

**ANALISIS PENERAPAN FATWA MUI NOMOR 30 TAHUN  
2016 TENTANG HUKUM PEMBAKARAN HUTAN DAN  
LAHAN SERTA PENGENDALIANNYA  
( STUDI KASUS DESA BOKOR KECAMATAN RANGSANG  
BARAT KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI )**

**PROPOSAL**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana  
( S1 ) Dalam Ilmu Syari'ah Dan Hukum Pada Jurusan Muallamat UIN  
Sumatera Utara

**Oleh :**

**RIEN HERDIANTY GUNAWAN**

**NIM : 24.13.4.075**



**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA**

**MEDAN**

**2017 M / 1438**

## **IKHTISAR**

Skripsi ini berjudul : Analisis Penerapan Fatwa MUI Nomor 30 Tahun 2016 Tentang Hukum Kebakaran Hutan Dan Lahan Serta Pengendaliannya (Studi Kasus Desa Bokor Kecamatan Nrangsang Barat Kabupaten Kepulauan Meranti). Penelitian ini dilatarbelakangi oleh permasalahan pokok yang mendasar yaitu masalah pembakaran hutan merupakan masalah serius sektor kehutanan yang sampai saat ini belum terselesaikan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana norma pelarangan pembakaran berdasarkan fatwa MUI Nomor 30 Tahun 2016 tentang hukum pembakaran hutan dan lahan serta pengendaliannya, bagaimana praktek pelanggaran pembakaran Di Desa Bokor Kecamatan Rangsang Barat Kabupaten Kepulauan Meranti dan apa saja faktor hukum dan penerapan fatwa MUI Nomor 30 Tahun 2016 tentang hukum pembakaran hutan dan lahan serta pengendaliannya Di Desa Bokor Kecamatan Rangsang Barat Kabupaten Meranti. Hasil penelitian menunjukkan dalam fatwa MUI telah jelas bahwa pembakaran hutan dan lahan hukumnya haram tetapi masih banyak masyarakat melakukan hal tersebut dengan faktor bahwa pekerjaan yang dilakukan telah menjadi tradisi turun temurun/kebiasaan, meminimalisir dana dan waktu sebagai faktor pendukungnya. Walaupun faktor utamanya adalah kurangnya sosialisasi bagi masyarakat guna melestarikan lingkungan sekitar.

## DAFTAR ISI

<b>PERSETUJUAN .....</b>	
I	
<b>PENGESAHAN .....</b>	
II	
<b>IKHTISAR .....</b>	
III	
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	
IV	
<b>DAFTAR ISI .....</b>	
VII	
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	
1	
A. Latar Belakang Masalah .....	
1	
B. Rumusan Masalah .....	
15	
C. Tujuan Penelitian .....	
16	
D. Manfaat Penelitian .....	
17	

E. Kerangka Penelitian .....	17
F. Hipotesis .....	18
G. Metode Penelitian .....	18
H. Sistematika Pembahasan .....	22

## **BAB II PERUSAKAN HUTAN DALAM HUKUM**

<b>ISLAM DAN FATWA .....</b>	<b>21</b>
A. Fikih Lingkungan Hidup ( <i>Fiqh Al-Bi'ah</i> ) .....	21
B. Pengertian Fatwa .....	21
C. Dalil - Dalil Hukum Pembakaran Menurut Fatwa MUI Nomor 30 Tahun 2016 .....	37

<b>BAB III PRAKTEK LAPANGAN .....</b>	<b>40</b>
A. Profil Desa Bokor Kecamatan Rangsang Barat Kabupaten Kepulauan Meranti .....	40
B. Pengetahuan Dasar Kebakaran Hutan .....	49
C. Pengendalian Kebakaran Hutan .....	56
D. Pencegahan dan Persiapan Pemadaman Kebakaran Hutan .....	58
E. Pemadaman Kebakaran Hutan .....	61
F. Penganganan Pasca Kebakaran .....	63

<b>BAB IV Analisis Penerapan Fatwa MUI Nomor 30 Tahun 2016 Tentang Pembakaran Hutan Dan Lahan Serta Pengendaliannya</b>	65
A. Analisis Penerapan Fatwa MUI No 30 Tahun 2016 Di Kecamatan Rangsang Barat	65
B. Faktor Yang Mempengaruhi Masyarakat Melakukan Pembakaran Hutan	70
C. Faktor Tidak Diterapkannya Fatwa MUI Nomor 30 Tahun 2016	77
<b>BAB V PENUTUP</b>	85
A. Kesimpulan	85
B. Saran	87
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	88

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Hutan dan lahan sebagai anugerah Allah SWT sangat penting untuk dijaga, dilestarikan dan dimanfaatkan guna mewujudkan kemaslahatan umum. Upaya pemanfaatan hutan dan lahan di tengah masyarakat sering kali dilakukan dengan cara membakar sehingga menimbulkan kerusakan dan kerugian.<sup>1</sup> Kawasan hutan merupakan kawasan penting sebagai keberlangsungan makhluk hidup. Selain berfungsi sebagai paru-paru dunia, hutan dianggap ‘rumah’ bagi berbagai ekosistem untuk menjaga kestabilan lingkungan.<sup>2</sup>

Masyarakat terdiri atas berbagai kelompok orang yang memiliki kepentingan yang berbeda, maka alokasi pemanfaatan sumber daya alam harus didasarkan pada kriteria *pareto optimal*, yaitu sebuah kebijakan pemanfaatan sumber daya alam yang dapat meningkatkan kesejahteraan sejumlah orang, tetapi tanpa memburukkan kesejahteraan kelompok lainnya.<sup>3</sup>

Berdasarkan data Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), setiap tahun hutan di Indonesia berkurang 2,7 (dua koma tujuh) juta hektar (ha). Hutan yang awalnya berjumlah 126,8 (seratus dua puluh enam koma delapan) juta ha, saat ini sudah berkurang sebanyak 72% (tujuh puluh dua persen). Hutan yang dimiliki

---

<sup>1</sup>Abdul Khakim, *Pengantar Hukum Kehutanan Indonesia (Dalam Era Otonomi Daerah)*, Cet.1,(Bandung : PT Citra Aditya Bakti,2005), Hal.1.

<sup>2</sup>Nandika Dodi, *Hutan Bagi Ketahanan Nasional*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2005), Hal.1.

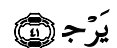
<sup>3</sup>Saifullah, *Hukum Lingkungan Paradigma Kebijakan Dibidang Konservasi Keanekaragaman Hayati*, (Malang : UIN Malang Press, 2007), Hal.48.

hanya tersisa 35,5 (tiga puluh lima koma lima) juta ha.<sup>4</sup>

Hutan merupakan suatu pondasi alam dalam menyediakan dan mengendalikan berbagai kebutuhan manusia, seperti udara, air dan sebagainya. Selain sebagai sumber daya alam hutan juga merupakan faktor ekonomi dilihat dari hasil-hasil yang dimilikinya. Namun, bersamaan itu pula sebagai dampak negatif atas pengelolaan hutan yang eksploitatif dan tidak berpihak pada kepentingan rakyat, pada akhirnya menyisakan banyak persoalan, diantaranya tingkat kerusakan hutan yang sangat mengkhawatirkan.<sup>5</sup>

Alam yang ada secara fisik dapat dimanfaatkan untuk kepentingan manusia dalam mengupayakan kehidupan yang lebih baik dan sehat menjadi tidak baik dan tidak sehat dan dapat pula sebaliknya, apabila pemanfaatannya tidak digunakan sesuai dengan kemampuan serta melihat situasinya dampak yang ditimbulkan tidak diperhatikan, akibatnya akan dirasakan oleh generasi berikutnya.<sup>6</sup> Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Q.S al-Rum ayat 41 :

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يُعْذَرُونَ



Artinya : Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).<sup>7</sup>

---

<sup>4</sup>Keharusan Pembenahan Struktural Untuk Perbaikan Tata Kelola, [http://www.Walhi.Or.Id/Wp-Content/Uploads/2016/01/Outlook2016\\_Edit\\_1.Pdf](http://www.Walhi.Or.Id/Wp-Content/Uploads/2016/01/Outlook2016_Edit_1.Pdf) Diakses 1 September 2017

<sup>5</sup>Abdul Khakim, *Pengantar Hukum Kehutanan Indonesia (Dalam Era Otonomi Daerah)*, Cet,1, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti,2005), Hal.3.

<sup>6</sup>Harun M Husein, *Lingkungan Hidup : Masalah Pengelolaan Dan Penegakan Hukumnya*, (Jakarta : Bumi Aksara, 1993), Hal.25.

<sup>7</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahan* (Jakarta : Lajnah Pentashihan Mushaf, 2005), Hal.409.

Mengamini ayat di atas, Al-Qur'an sudah dengan tegas melarang manusia untuk melakukan kerusakan dalam bentuk apapun di muka bumi ini. Sesuai dengan firman Allah SWT:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٥٦﴾

Artinya: “Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan), sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik”. (Q.S Al-Araf: 56)<sup>8</sup>

Maka dari itu Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan Fatwa Nomor 30 Tahun 2016 Tentang Hukum Pembakaran Hutan Dan Lahan Serta Pengendaliannya yang dimana berisikan ketentuan umum bahwa hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan dan lahan adalah suatu hamparan ekosistem daratan di luar kawasan hutan yang manfaatnya untuk usaha, kegiatan ladang dan/atau kebun bagi masyarakat, sedangkan pembakaran hutan dan lahan adalah perbuatan manusia secara sengaja yang menyebabkan terbakarnya hutan dan/atau lahan, dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan adalah tindakan pencegahan, penanggulangan dan penanganan kebakaran. Ketentuan hukum melakukan pembakaran hutan dan lahan yang dapat menimbulkan kerusakan, pencemaran lingkungan, kerugian orang lain, gangguan kesehatan, dan dampak buruk lainnya, hukumnya haram. Memfasilitasi, membiarkan, dan/atau

---

<sup>8</sup> Ibnu Hayyan, *Al - Buhru Almuhiath*, Juz 5 (Beirut : Dar Al-Fikr,Tt), Hal.256.



mengambil keuntungan dari pembakaran hutan dan lahan hukumnya haram, kejahatan dan pelakunya dikenakan sanksi sesuai dengan tingkatan kerusakan dan dampak yang ditimbulkannya, dan untuk pengendalian kebakaran hutan dan lahan hukumnya wajib.

Dengan berlatar belakang bahwa hutan merupakan sumber kekayaan alam yang memberikan yang dibutuhkan manusia dan sekaligus dapat mensejahterakan rakyat secara lestari, maka pemerintah memandang perlu mengeluarkan peraturan perundangan yang dapat digunakan sebagai landasan dalam membuat kebijaksanaan dalam bidang hutan dan kehutanan. Maka menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 pasal 4 berbunyi :

- (1) Semua hutan di dalam wilayah Republik Indonesia termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
- (2) Penguasaan hutan oleh Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberi wewenang kepada pemerintah untuk:
  - a. mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan;
  - b. menetapkan status wilayah tertentu sebagai kawasan hutan atau kawasan hutan sebagai bukan kawasan hutan; dan
  - c. mengatur dan menetapkan hubungan-hubungan hukum antara orang dengan hutan, serta mengatur perbuatan-perbuatan hukum mengenai kehutanan.

(3) Penguasaan hutan oleh Negara tetap memperhatikan hak masyarakat hukum adat, sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, serta tidak bertentangan dengan kepentingan nasional.<sup>9</sup>

Agar segala kegiatan yang berkaitan dengan masalah kehutanan dan untuk menjamin kelancaran, ketertiban serta kelestarian pelaksanaan kegiatan tersebut maka diperlukan landasan kerja dan landasan hukum yang dapat menampung persoalan secara menyeluruh.<sup>10</sup>

Kebakaran-kebakaran yang sering terjadi kerap digeneralisir sebagai kebakaran hutan, padahal sebagian besar 10% (sepuluh persen) kebakaran tersebut adalah pembakaran yang sengaja dilakukan maupun akibat kelalaian, sedangkan sisanya 0,1% (nol koma satu persen) adalah karena alam (petir, larva gunung berapi). Areal Hutan Tanaman Industri (HTI), hutan alam, dan perladangan dapat dikatakan 99% (sembilan puluh sembilan persen) penyebab kebakaran hutan di Indonesia yang berasal dari ulah manusia, baik itu sengaja dibakar atau karena penjaralan api yang terjadi akibat kelalaian pada saat penyiapan lahan.<sup>11</sup>

Kerugian yang ditimbulkan tidak hanya secara fisik, sosial, ekonomi, politik dan keamanan, tetapi juga kerugian terhadap lingkungan, khususnya terhadap keanekaragaman hayati. Bencana kebakaran hutan yang terbesar terjadi pada tahun 1997-1998. Saat itu meliputi hampir sebagian wilayah Asia Tenggara

---

<sup>9</sup>Djanis Djamin, *Pengawasan Dan Pelaksanaan Undang-Undang Lingkungan Hidup Suatu Analisis Sosial*, (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2007), Hal.130.

<sup>10</sup>Suparto Wijoyo, *Hukum Lingkungan : Mengenal Instrumen Hukum Pengendalian Pencemaran Udara Di Indonesia*, (Surabaya : Airlangga University Press, 2004), Hal.2.

<sup>11</sup>*Negara Membenarkan Pembukaan Lahan Dengan Cara Dibakar*, [http://www.kompasiana.com/Alldie/Negara-Membenarkan-Pembukaan-Lahan-Dengan-Cara-Dibakar\\_562b407b917a615a073fe578](http://www.kompasiana.com/Alldie/Negara-Membenarkan-Pembukaan-Lahan-Dengan-Cara-Dibakar_562b407b917a615a073fe578), Diakses 24 Oktober 2017

terkena dampak dari asap yang dihasilkan.<sup>12</sup> Firman Allah SWT yang melarang melakukan perbuatan yang merugikan hak-hak manusia dan membuat kerusakan Q.S al Syu'ara' ayat 183

وَلَا تَبْخُسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

artinya : dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan.<sup>13</sup>

Pada kesempatan penulis bertanya pada masyarakat setempat bahwa pembakaran yang disengaja oleh masyarakat sekitar hutan untuk membuka atau membersihkan lahan pertanian atau perkebunan, cara ini telah dilakukan mereka sejak turun-temurun. mereka merasa bahwa pembukaan lahan dengan api tidak memerlukan waktu yang cukup lama dan lebih ekonomis, apabila penggunaan api tidak digunakan secara baik dan benar maka dapat menyebabkan terjadinya kebakaran hutan. Penggunaan api yang dilakukan oleh masyarakat sekitar hutan untuk pembersihan lahan, telah memiliki cara dalam rangka mencegah kebakaran. Sekat bakar merupakan bagian dari cara pengendalian pembakaran yang umumnya digunakan masyarakat. Cara ini menurut mereka dapat mengatasi permasalahan tersebut. Namun setiap daerah yang pembukaan lahannya dengan pembakaran telah memiliki pola tersendiri dan setiap daerah tersebut belum tentu memiliki pola yang sama. Hal ini disebabkan adanya latar belakang budaya yang tidak sama.

Menurut bidan Finne warga Desa Bokor mengatakan bahwa akibat kebakaran hutan yang di lakukan masyarakat telah mengganggu kesehatan,

---

<sup>12</sup>Fuad Amsyari, *Prinsip-Prinsip Masalah Pencemaran Lingkungan*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1977), Hal.35.

<sup>13</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*, Hal.208.

terutama masyarakat rentan seperti orang lanjut usia, ibu hamil, dan anak-anak dibawah lima tahun (balita). Gangguan kesehatan antara lain, infeksi saluran pernapasan atas (ISPA), asma bronkial, bronkhitis, pnemonia (radang paru), iritasi mata, dan kulit.<sup>14</sup>

Kondisi lingkungan Riau pada saat itu sedang tidak baik. Kabut asap yang melanda Riau sepertinya kabut asap terlama. Hingga menjelang akhir bulan juli 2017, kabut asap belum juga berkurang bahkan semakin padat. Asap tidak lagi hanya berupa kabut namun juga disertai partikel debu padat. Seperti yang diketahui kabut asap bisa terjadi dikarenakan dua hal, pertama kebakaran hutan dan kedua dikarenakan pembakaran lahan hutan perkebunan. Sekitar bulan Juli 2017 lalu, kebakaran hutan kembali terjadi di Riau dan terdapat beberapa titik api yang membakar lahan dan hutan tersebut. Kabut asap pun merata di beberapa kota di Riau hingga wilayah Singapura.<sup>15</sup>

Indonesia memiliki catatan buruk seputar penyelesaian berbagai persoalan lingkungan hidup. Persoalan tata ruang, pertumbuhan pendidik, populasi, sampah, pembakaran hutan, bencana alam dan limbah hanyalah sedikit contoh dari banyaknya kasus lingkungan hidup yang belum terurai atau terselesaikan.<sup>16</sup>

Tanggung jawab negara mengenai kebakaran hutan sebagai pencemaran udara lintas batas diatur dalam hukum nasional Indonesia. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menyatakan: “Pengelolaan lingkungan hidup yang diselenggarakan dengan asas

---

<sup>14</sup>Wawancara Dengan Ibu Bidan Finne (Masyarakat Desa Bokor), Tanggal 28 Juli 2017

<sup>15</sup> <http://Sains.Kompas.Com/Besarkah.Potensi.Kebakaran.Hutan.Dan.Lahan.Di.Indonesia/110500823/2017> Diakses 31 Oktober 2017

<sup>16</sup>Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan Di Indonesia*, (Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2011), Hal.164.

tanggung jawab negara, asas berkelanjutan, dan asas manfaat bertujuan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa”.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 pada Pasal 50 ayat (3) huruf d menyatakan bahwa “*Setiap orang dilarang membakar hutan*” dan di dalam penjelasannya mengemukakan bahwa: “Pembakaran hutan secara terbatas diperkenankan hanya untuk tujuan khusus atau kondisi yang tidak dapat dielakkan, antara lain pengendalian kebakaran hutan, pembasmian hama dan penyakit, serta pembinaan habitat tumbuhan dan satwa. Pelaksanaan pembakaran secara terbatas tersebut harus mendapat izin dari pejabat yang berwenang”.<sup>17</sup>

Pada Pasal 64 Undang-Undang ini menyatakan bahwa pemerintah dan masyarakat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan hutan yang berdampak nasional dan internasional. Pasal ini pula yang menegaskan adanya partisipasi masyarakat dan pemerintah dalam melaksanakan tanggung jawab dalam pengelolaan hutan. Aturan yuridis yang lebih mendekati terhadap permasalahan pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan atau Lahan. Ditegaskan pada Pasal 11 yang menyatakan bahwa “*setiap orang dilarang melakukan kegiatan pembakaran hutan dan atau lahan*”. Dengan demikian

---

<sup>17</sup> *Ibid*, Hal.179.

adanya keharusan bagi setiap warga negara dan pemerintah Indonesia untuk mencegah dan mengendalikan kebakaran hutan sesuai dengan tanggung jawab negara yang berlaku.<sup>18</sup>

Dalam melakukan suatu kegiatan harus sesuai dengan peraturan yang berlaku dengan tidak merugikan pihak manapun. Dengan mempertahankan kawasan lindung gambut petani mampu bertahan hidup dari usahatani di lahan gambut sejak puluhan tahun yang lalu. Namun kecenderungan membuka lahan gambut secara berlebihan sangat mengancam kehidupan tidak saja masyarakat yang hidup di lahan gambut tersebut, tetapi juga masyarakat di lingkungan yang lebih luas.<sup>19</sup>

Kebakaran yang tidak terkendali menyebabkan api menjalar kemana-mana, terlebih lagi terjadi pada lahan gambut. Kebakaran lahan gambut lebih berbahaya dibandingkan dengan kebakaran pada lahan kering (tanah mineral). Selain kebakaran vegetasi dipermukaan, lapisan gambut juga terbakar dan bertahan lama, sehingga menghasilkan asap tebal akibat pembakaran yang tidak sempurna. Hal ini terjadi dalam kehidupan masyarakat di berbagai wilayah lahan gambut yang terdapat di Indonesia.<sup>20</sup>

Maka MUI mengeluarkan fatwa Nomor 30 Tahun 2016 tentang hukum pembakaran hutan dan lahan serta pengendaliannya, hal ini telah terjadi dalam Desa Bokor Kecamatan Rangsang Barat Kabupaten Kepulauan Meranti dalam

---

<sup>18</sup>Bambang Eko Supriyadi, *Hukum Agraria Kehutanan: Aspek Hukum Pertanahan Dalam Pengelolaan Hutan Negara*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), Hal.68-69.

<sup>19</sup>Jhon Salindeho, *Undang-Undang Gangguan Dan Masalah Penanggulangannya*, (Jakarta : Sinar Grafika, 1993), Hal.28.

<sup>20</sup>Urip Santosa, *Hukum Agraria, Kajian Komprehensif*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013), Hal.169.

melakukan pemanfaatan hutan dan lahan dengan cara membakar sehingga tidak memperhatikan memaslahatan umum karena dapat menyebabkan tergangunya transportasi, kesehatan, pendidikan, sosial, ekonomi, keanekaragaman hayati, dan lingkungan.

Dari uraian tersebut penulis tertarik untuk mempelajari dan karena itu penulis merasa berkeinginan membuat suatu karya ilmiah berupa skripsi dengan judul **"ANALISIS PENERAPAN FATWA MUI NOMOR 30 TAHUN 2016 TENTANG HUKUM KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN SERTA PENGENDALIANNYA (STUDI KASUS DESA BOKOR KECAMATAN RANGSANG BARAT KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI)"**

## **B. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah di atas, yang mengacu pada pokok permasalahan adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana norma pelarangan pembakaran berdasarkan Fatwa MUI Nomor 30 Tahun 2016 Tentang Hukum Pembakaran Hutan Dan Lahan Serta Pengendaliannya?
2. Bagaimana praktek pelanggaran pembakaran di Desa Bokor Kecamatan Rangsang Barat Kabupaten Kepulauan Meranti ?
3. Apa saja faktor pembakaran hutan dan penerapan fatwa MUI Nomor 30 Tahun 2016 Tentang Hukum Pembakaran Hutan Dan Lahan Serta Pengendaliannya Di Desa Bokor Kecamatan Rangsang Barat Kabupaten Kepulauan Meranti?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian yang mengarah pada pokok permasalahan adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan Fatwa MUI Nomor 30 Tahun 2016 Tentang Hukum Pembakaran Hutan Dan Lahan Serta Pengendaliannya.
2. Untuk mengetahui pandangan dan pendapat masyarakat mengenai fatwa MUI Nomor 30 Tahun 2016 tentang Hukum Pembakaran Hutan dan Lahan serta pengendaliannya di Desa Bokor Kecamatan Rangsang Barat Kabupaten Kepulauan Meranti.
3. Untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan dari fatwa MUI Nomor 30 Tahun 2016 tentang Hukum Pembakaran Hutan dan Lahan serta pengendaliannya di Desa Bokor Kecamatan Rangsang Barat Kabupaten Kepulauan Meranti.

### **D. Manfaat Penelitian**

Penulis berharap hasil penelitian ini dapat bermanfaat paling tidak terhadap dua aspek, yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat sebagai sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya hukum agraria dan hukum lingkungan hidup sebagai bahan rujukan bagi semua pihak yang terkait pada masalah penelitian ini.



## 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat dijadikan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S1) di dalam ilmu syariah pada jurusan Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum Di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

### **E. Kerangka Pemikiran**

Kegiatan pelestarian hutan dan lahan itu sangat diperlukan, dimana hal tersebut sudah diatur sesuai hukum yang berlaku di Indonesia. Namun, yang sering terjadi adalah hutan dan lahan di bakar sehingga menimbulkan kerusakan, pencemaran lingkungan, gangguan kesehatan dan dampak yang sangat buruk bagi kehidupan masyarakat. Pada perbuatan tersebut adalah perbuatan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah yaitu merugikan kemaslahatan umum. Hal ini terdapat pada fatwa MUI Nomor 30 Tahun 2016 atas dasar tersebut membuat saya berkeinginan melakukan penelitian lebih dalam tentang mengapa adanya ketidaksesuaian aturan dengan melakukan kebakaran hutan dan lahan yang dapat menimbulkan kerusakan dan dampak buruk bagi masyarakat sekitar di Desa Bokor Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti.

### **F. Hipotesis**

Berdasarkan ungkapan sebelumnya yang sudah penulis jabarkan, penulis mengambil kesimpulan sementara bahwa pembakaran hutan dan lahan telah dilaksanakan secara turun temurun di Riau dikarenakan lebih menghemat biaya pembukaan lahan, dan belum adanya sosialisasi kemasyarakat bahwa perbuatan

yang dilarang oleh fatwa MUI Nomor 30 Tahun 2016 tentang hukum pembakaran hutan dan lahan serta pengendaliannya.

### **G. Metode Penelitian**

Penelitian ini bersifat Yuridis Empiris yaitu Pendekatan dari sudut kaidah-kaidah dan pelaksanaan peraturan yang berlaku di masyarakat, dilakukan dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer yang ada di lapangan.<sup>21</sup>

#### **1. Jenis Penelitian**

- a. Penelitian Perpustakaan (data sekunder). Melalui metode penelitian ini, data dan informasi penus peroleh dari bahan-bahan kepustakaan seperti buku-buku, teks, jurnal (majalah ilmiah, karya tulis ilmiah dan bahan-bahan lainnya) yang relevan dengan pembahasan ini
- b. Penelitian Lapangan (primer). Melalui metode penelitian ini, yakni untuk memperoleh data, penulis terjun langsung kelapangan, guna mendapatkan data yang lebih aktual melalui objeknya langsung.<sup>22</sup>

#### **2. Lokasi penelitian**

Lokasi penelitian ini berada di Riau tepatnya di Desa Bokor Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti. Objek penelitian dalam skripsi ini adalah bentuk pelaksanaan hukum pembakaran hutan dan lahan serta pengendaliannya.

#### **3. Instrumen pengumpulan data**

---

<sup>21</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press,2001),Hal.52.

<sup>22</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin,*Pengantar Metode Penelitian Hukum*,(Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004), Hal.49.

Untuk mengumpulkan data dilakukan dengan cara :

- a. Observasi merupakan mengadakan pengamatan langsung pada objek penelitian dengan melakukan pengetahuan keadaan daerah penelitian guna penjajakan dan pengambilan data sekunder mengenai hal-hal yang berkaitan dengan gambaran umum lokasi penelitian.
- b. Wawancara merupakan dialog yang dilakukan penulis kepada narasumber dan pihak yang berwenang memberikan informasi yang dibutuhkan penulis dengan mengajukan pertanyaan yang disusun dalam suatu daftar yang telah disiapkan lebih dahulu. Wawancara harus mempunyai tujuan yang tertentu agar tidak menjadi suatu percakapan yang tidak sistematis atau melakukan pengamatan yang tidak mempunyai ujung pangkal. Oleh karena itu, penelitian yang dilakukan wawancara mempunyai tiga kewajiban, yaitu :
  - 1) Memberitahu informasi tentang hakikat penelitian dan pentingnya kerja sama mereka dengan peneliti,
  - 2) Menghargai informasi atas kerjasamanya, dan
  - 3) Memproleh informasi dan data yang diinginkan.
- c. Catatan lapangan diperlukan untuk menelusuri hal-hal baru yang terdapat dialapangan yang ada kaitannya dengan daftar pertanyaan yang telah disiapkan.

## **H. Sistematika Pembahasan**

Dalam penelitian ini disusun dengan sistematika perbab yang masing-masing bab ada keterkaitan serta merupakan satu kesatuan yang utuh. Bab-bab tersebut merupakan kebutuhan penjelasan dari penelitian ini.

Bab pertama : Merupakan Bab Pendahuluan terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka penelitian, hopotesis, metode penelitian.

Bab kedua : Membahas fikih lingkungan hidup, pengertian, urgensi dan bentuk pelestarian juga membahas pengertian fatwa dan dalil hukum pembakaran hutan.

Bab ketiga : Membahas profil desa bokor, dasar pembakaran hutan, pengendalian, pencegahan kebakaran hutan, persiapan pemadaman dan penanganan pasca kebakaran hutan.

Bab keempat : Membahas tentang hasil penelitan di Desa Bokor mengenai analisis penerapan fatwa MUI, faktor yang mempengaruhi masyarakat melakukan pembakaran hutan.

Bab kelima : Merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.

## BAB II

### PERUSAKAN HUTAN DALAM HUKUM ISLAM DAN FATWA MUI

#### A. Fikih Lingkungan Hidup (*fiqh al-bi'ah*)

##### 1. Pengertian Fikih Lingkungan Hidup

Dalam bahasa arab fikih lingkungan hidup dipopulerkan dengan istilah *fiqhul bi'ah*, yang terdiri dari dua kata (kalimat majemuk; *mudhaf dan mudhaf ilaih*), yaitu kata *fiqh* dan *al-bi'ah*. Secara bahasa “*Fiqh*” berasal dari kata *Faqiha-Yafqahu-Fiqhan* yang berarti *al-‘ilmu bis-syai’i* (pengetahuan terhadap sesuatu) *al-fahmu* (pemahaman), sedangkan secara istilah, fikih adalah ilmu pengetahuan tentang hukum-hukum syara’ yang bersifat praktis yang diambil dari dalil-dalil *tafshili* (terperinci). Adapun kata “*Al-Bi'ah*” dapat diartikan dengan lingkungan hidup, yaitu: Kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

Dari sini, dapat kita berikan pengertian bahwa fikih lingkungan adalah ketentuan-ketentuan Islam yang bersumber dari dalil-dalil yang terperinci tentang perilaku manusia terhadap lingkungan hidupnya dalam rangka mewujudkan kemashlahatan dan menjauhkan kerusakan.<sup>23</sup>

Pemahaman masalah lingkungan hidup (*fiqh al-Bi'ah*) dan penanganannya (penyelamatan dan pelestariannya) perlu diletakkan di atas suatu pondasi moral

---

<sup>23</sup> Sukarni, *Fikih Lingkungan Hidup* (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), Hal.45.

untuk mendukung segala upaya yang sudah dilakukan dan dibina selama ini yang ternyata belum mampu mengatasi kerusakan lingkungan hidup yang sudah ada dan masih terus berlangsung. Fiqh lingkungan hidup berupaya menyadarkan manusia yang beriman supaya menginsafi bahwa masalah lingkungan hidup tidak dapat dilepaskan dari tanggung jawab manusia yang beriman dan merupakan amanat yang diembannya untuk memelihara dan melindungi alam yang dikaruniakan Sang pencipta yang Maha pengasih dan penyayang sebagai hunian tempat manusia dalam menjalani hidup di bumi ini.<sup>24</sup>

## 2. Urgensi Fikih Lingkungan Hidup

Ketika krisis lingkungan yang semakin memburuk tidak mampu diatasi dengan seperangkat teknologi, sains dan hukum (undang-undang) sekuler, masyarakat dunia membutuhkan peran agama guna menumbuhkan kesadaran otentik dalam diri manusia, yaitu nilai-nilai agama. Artinya, pemahaman agama saat ini tidak lagi berkutat pada masalah-masalah spiritual, tetapi juga harus beranjak ke aspek-aspek nyata masyarakat pemeluknya dalam hal ini kepedulian terhadap lingkungan. Dengan nilai-nilai agama, manusia akan memiliki kecakapan mengatasi dan ketajaman membaca tanda-tanda zaman berikut kemampuan menciptakan seperangkat nilai untuk melestarikannya lewat hukum dan sejumlah peraturan.

Manusia hanya sebagai ciptaan yang tujuan penciptaannya adalah untuk beribadah dan menjadi pengatur di muka bumi. Dengan prinsip ibadah dan khalifah, seharusnya manusia mengelola alam dengan prinsip pengabdian dan

---

<sup>24</sup> <http://kalsel.muhammadiyah.or.id/> diakses pada Tanggal 26 Februari 2019

pengaturan. Pengabdian berarti manusia mengelola alam dengan cara yang menunjukkan bakti kepada Allah SWT. Sedangkan pengaturan berarti mengelola lingkungan untuk kebutuhan dirinya dengan cara menjaga keawetan dan kelestarian kualitas alam. Alam sendiri pada dasarnya juga mempunyai perjanjian tersendiri dengan Allah. Al-Qur'an menyebutkan bahwa seluruh ciptaan yang ada di bumi dan di langit bertasbih kepada Allah, namun manusia tidak mengetahui tasbihnya.

Allah SWT telah mengamanahkan pada manusia tiga hal yang perlu dijaga supaya tidak termasuk orang yang fasik. Hal ini sebagaimana tertuang dalam firman Allah Qs. Al-Baqarah: 26-27 yang artinya kurang lebih: "...tetapi tidak ada yang Dia sesatkan dengan (perumpamaan) itu selain orang-orang fasik. (Yaitu) orang-orang yang melanggar perjanjian Allah (kufur akidah) dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah untuk disambungkan (*kufur insaniyah/ijtima'iyah*) dan berbuat kerusakan di bumi (*kufur kauniyah/ekologi*). Mereka itulah orang-orang yang rugi." Tiga karakteristik manusia dalam ayat tersebut kemudian harus menjadi rambu-rambu bagi keislaman dan keimanan. Berdasarkan ayat di atas, terdapat tiga bentuk proses menuju keselamatan (Islam) dan keamanan (Iman) yang bisa diekspresikan. Pertama, mengakui ke-Esaan Allah. Kedua, menjalin hubungan yang baik dengan sesama manusia; dan Ketiga, menjalin hubungan yang seimbang dengan alam.

Imam Yusuf Qaradhawi, dalam kitabnya *Ri'ayat al-Bi'ah fi Syariat al-Islam*, memasukkan pemeliharaan lingkungan (*hifdz al-'alam*) ke dalam bagian *maqashid al-syari'ah* (tujuan syariat). Dalam hal ini, ada 2 (dua) hal yang harus

kita lakukan dalam menggali dasar-dasar fikih lingkungan. Pertama, menjelaskan hikmah perennial Islam tentang tatanan dan struktur bumi dan alam dan kaitan eratny dengan setiap fase kehidupan manusia. Kedua, menumbuhkan dan mengembangkan kesadaran bumi yang berperspektif teologis atau membangun teologi yang berbasis kesadaran dan kearifan bumi.<sup>25</sup>

Dengan demikian, tujuan diproyeksikannya *maqashid al-syari'ah* adalah untuk menjaga kekayaan bumi, menjaga sumber-sumbernya, menumbuhkembangkan hasil dan produk-produknya, menyadarkan akibat dari pengrusakan kawasan bumi, serta pola pemerataannya pada seluruh lapisan umat manusia. Setiap tindakan yang menafikan tujuan-tujuan tersebut sama halnya menghilangkan tujuan-tujuan syariat Islam dan menodai prinsip-prinsip kepentingan yang terkandung di dalamnya.

Jika selama ini ada lima komponen hidup yang harus dipelihara oleh seluruh manusia yakni *hifdzul nafs* (menjaga jiwa), *hifdzul aql* (menjaga akal), *hifdzul maal* (menjaga harta), *hifdzul nasl* (menjaga keturunan) dan *hifdzud diin* (menjaga agama). Dalam konteks sekarang ini yang menjadi masalah besar dan harus diberi tempat perkembangannya yaitu kerusakan lingkungan hidup. Jadi kalau kita dalam kaidah mengatakan perlu ada *hifdzul nafs* atau *hifdzud diin*, maka sekarang ini patut kita masukkan ke dasar agama adalah *hifdzul bi'ah* (memelihara lingkungan hidup). Itu kepentingan kehidupan manusia. Seluruh

---

<sup>25</sup> Yusuf Al-Qardhawi, *Ri'ayatu Al-Bi'ah fi As-Syari'ah Al-Islamiyah*, (Kairo: Dar Al-Syuruq, 2001), Hal.39.



manusia berkepentingan terhadap kebersihan lingkungan, terhadap keselamatan lingkungan.<sup>26</sup>

### 3. Bentuk Pelestarian Lingkungan Hidup

Dalam Islam di kenal tiga macam bentuk pelestarian lingkungan. *Pertama*, dengan cara *ihya'*. Yakni pemanfaatan lahan yang dilakukan oleh individu. Dalam hal ini seseorang mematok lahan untuk dapat digarap dan difungsikan untuk kepentingan pribadinya. Orang yang telah melakukannya dapat memiliki tanah tersebut. Mazhab Syafi'i menyatakan siapapun berhak mengambil manfaat atau memilikinya, meskipun tidak mendapat izin dari pemerintah. Lain halnya dengan Imam Abu Hanifah, beliau berpendapat, *Ihya'* boleh dilakukan dengan catatan mendapat izin dari pemerintah yang sah. Imam Malik juga berpendapat hampir sama dengan Imam Abu Hanifah. Akan tetapi, beliau menengahi dua pendapat itu dengan cara membedakan dari letak daerahnya.

*Kedua*, dengan proses *igta'*. Yakni pemerintah memberi jatah pada orang-orang tertentu untuk menempati dan memanfaatkan sebuah lahan. Adakalanya untuk dimiliki atau hanya untuk dimanfaatkan dalam jangka waktu tertentu.

*Ketiga*, adalah dengan cara *hima*. Dalam hal ini pemerintah menetapkan suatu area untuk dijadikan sebagai kawasan lindung yang difungsikan untuk kemaslahatan umum. Dalam konteks dulu, *hima* difungsikan untuk tempat penggembalaan kuda-kuda milik negara, hewan, zakat dan lainnya. Setelah pemerintah menentukan sebuah lahan sebagai *hima*, maka lahan

---

<sup>26</sup> Satria Effendi, M.Zein, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Kencana, 2005), Hal.13.

tersebut menjadi milik negara. Tidak seorang pun dibenarkan memanfaatkannya untuk kepentingan pribadinya melakukan (*ihya'*), apalagi sampai merusaknya.<sup>27</sup>

## B. Pengertian Fatwa

Kesadaran beragama umat Islam di nusantara semakin tumbuh subur. Oleh karenanya, sudah merupakan kewajiban jika setiap persoalan baru, umat mendapatkan jawaban yang tepat dari pandangan agama Islam.

Para alim ulama dituntut untuk segera mampu memberikan jawaban dan berupaya menghilangkan kerisauan umat Islam akan kepastian ajaran agama Islam yang berkenaan dengan persoalan yang mereka hadapi. Demikina juga, segala hal yang dapat menghambat proses pemberian jawaban (fatwa) sudah seharusnya segera dapat diatasi. Hal tersebut sesuai dengan firman Allah SWT:

إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَأَهْدَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَٰئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّعْنُونَ ﴿١٠١﴾

Sesungguhnya orang-orang yang Menyembunyikan apa yang telah Kami turunkan berupa keterangan-keterangan (yang jelas) dan petunjuk, setelah Kami menerangkannya kepada manusia dalam Al Kitab, mereka itu dila'nati Allah dan dila'nati (pula) oleh semua (mahluk) yang dapat mela'nati,<sup>28</sup>

Menurut al-Raqib al-Isfahani, meskipun term *fatwa* ditemukan dalam al-Qur" ān dalam derivasi yang berbeda-beda, sesungguhnya memiliki makna yang sama yaitu jawaban dari persoalan hukum yang banyak ditanyakan kepada Rasulullah ketika itu. Dilihat dari jawaban yang diberikan dalam al-Qur" ān,

<sup>27</sup> Usman, Muchlis, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah Dan Fiqhiyah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999)

<sup>28</sup> Al-Zuhaili, Wahbah, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, (Beirut : Dar Al-Fikr Al-Mu'ashir, 1998), Hal.434.

peminta *fatwa* waktu itu cenderung realistis, faktual, sehingga jawaban yang diberikan pun menggunakan bahasa yang jelas dan menjawab persoalan.

Dalam ilmu *Uṣūl Fiqh*, fatwa berarti pendapat yang dikemukakan seorang *mujtahid* atau *fāqih* sebagai jawaban yang diajukan peminta fatwa dalam suatu kasus yang sifatnya tidak mengikat. Fatwa juga dapat diterjemahkan sebagai petuah, nasehat, jawaban atas pertanyaan yang berkaitan dengan hukum, sedangkan secara *terminologi*, sebagaimana dikemukakan oleh Zamakhshari fatwa adalah penjelasan hukum *syara'* tentang suatu masalah atas pertanyaan seseorang atau kelompok.<sup>29</sup>

Fatwa mempunyai kedudukan penting dalam agama Islam. Fatwa atau ketetapan ulama dipandang menjadi salah satu alternatif yang bisa memecahkan kebekuan dalam perkembangan hukum Islam. Hukum Islam yang dalam penetapannya tidak bisa terlepas dari dalil-dalil keagamaan (*al-nuṣuṣ al-syari'iyah*) menghadapi persoalan serius ketika berhadapan dengan permasalahan yang semakin berkembang yang tidak tercangkup dalam *naṣ-naṣ* keagamaan. *Naṣ-naṣ* keagamaan telah berhenti secara kuantitasnya, akan tetapi diametral permasalahan dan kasus semakin berkembang pesat seiring dengan perkembangan zaman.

Untuk memperjelas *terminologi* fatwa yang saat ini mengalami generalisasi dan distorsi oleh beberapa kalangan. Beberapa hal berikut adalah konsep fatwa:

---

<sup>29</sup> Djazuli, A, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2007), Hal.43.

(1) Fatwa adalah jawaban atas pertanyaan kaitannya dengan hukum agama.

Jadi berbeda dengan *irsyad* atau nasehat tidak memerlukan pertanyaan;

(2) Fatwa harus disampaikan kepada penannya/peminta fatwa;

(3) Fatwa tidak mengikat/mewajibkan untuk diikuti sehingga berbeda dengan hukum atau *qaḍa'* yang dikeluarkan hakim;

(4) Fatwa adalah respon atas suatu persoalan yang muncul sehingga berbeda dengan pengajaran (*ta'lim*);

(5) Fatwa adalah berdasarkan dalil *syara'* sehingga tidak berangkat dari pendapat tanpa dasar;

(6) Fatwa mencakup hal-hal yang bersifat *qaṭ'i* (jelas hukumnya) dan *ẓanni* sehingga berbeda dengan *ijtihād* yang tidak digunakan untuk masalah *qaṭ'i*;

(7) Fatwa bisa dilakukan dengan perkataan, perbuatan, tulisan, isyarat.

(8) Fatwa mencakup semua persoalan kehidupan meliputi '*āqidah*, '*ibadah*, *akhlak*, dan *mu'āmalah*.<sup>30</sup>

#### 1. Latar Belakang Lahirnya Fatwa MUI Nomor 30 Tahun 2016 Tentang Hukum Pembakaran Hutan Dan Lahan Serta Pengendaliannya.

Hal ini mengingat bahwa pentingnya pelestarian lingkungan dalam rangka menjaga ekologi, ekosistem, sosial, ekonomi, budaya dan lain sebagainya. hutan sangat penting bagi kehidupan, bahkan hutan Indonesia adalah paru-parunya dunia. Berdasarkan mengingat pentingnya masalah hutan maka pemerintah khususnya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan meminta Majelis

---

<sup>30</sup> [Http://DariIslam.Blogspot.Com/2010/03/Fatwa-Pengertian.Html](http://DariIslam.Blogspot.Com/2010/03/Fatwa-Pengertian.Html). diakses Tanggal 5 Februari 2019

Ulama Indonesia untuk mengeluarkan fatwa tentang kebakaran hutan dan lahan. Pemerintah menilai MUI pantas mengeluarkan fatwa ini. Setelah mengingat dan menimbang akibat yang ditimbulkan dari pembakaran hutan sangat besar, maka MUI memutuskan untuk mengeluarkan fatwa atas dasar permintaan dari pemerintah tersebut. Akhirnya pada tanggal 27 Juli 2016 yang ditandatangani oleh Prof. Dr. H. Hasaniddin AF., MA sebagai ketua dan Dr. H. Asrorun Ni" am Sholeh, MA sebagai Sekretaris, maka keluarlah fatwa No. 30 tahun 2016 tentang pembakaran hutan dan lahan serta pengendaliannya. Yang memutuskan sebagai berikut: "Dalam fatwa tersebut terdapat beberapa ketentuan umum yang berisi pengertian-pengertian umum diantaranya pengertian hutan dan lahan, pengertian dari pembakaran hutan dan lahan serta pengendaliannya. MUI pun menyertakan ketentuan–ketentuan hukum dalam fatwa ini, bahwa MUI mengharamkan dalam melakukan pembakaran hutan dan lahan yang dapat menimbulkan dampak buruk seperti kerusakan, pencemaran lingkungan, kerugian orang lain, membiarkan dan/atau mengambil keuntungan dari pembakaran hutan dan lahan tersebut.

Meskipun fatwa MUI tersebut dengan tegas melarang pembakaran hutan dan lahan, namun ada beberapa hal dengan pengecualian yaitu untuk pemanfaatan hutan dan lahan dibolehkan dengan syarat-syarat yaitu mempunyai hak yang sah untuk pemanfaatannya, memiliki izin dari yang berwenang dengan berbagai ketentuan yang ada, serta melihat dari kemaslahatannya dan tidak menimbulkan kerusakan yang berdampak buruk terhadap lingkungan. Jika syarat tersebut tidak terpenuhi maka hukumnya haram.

MUI mengambil kaidah-kaidah fiqih yang sangat mendasar dalam mengeluarkan fatwa ini diantaranya

الضَّرَرُ يُزَالُ

Artinya : "kemudharatan harus dihilangkan".

الضَّرَرُ يُزَالُ بِالضَّرَرِ

Artinya: "kemudharatan tidak boleh dihilangkan/diganti dengan kemudharatan (yang lain)".

Dalam kedua kaidah tersebut menerangkan bahwa berbuat kerusakan kepada orang lain secara mutlak atau mendatangkan kerusakan kepada orang lain dengan cara yang tidak diijinkan oleh agama. Serta kaidah fiqih dibawah ini:

دَرَأُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : mencegah kemafsadatan lebih didahulukan (diutamakan)dari pada mendatangkan kemaslahatan".

Dalam kaidah ini apabila seseorang menimbulkan bahaya yang nyata pada hak orang lain dan memungkinkan ditempuh langkah-langkah pencegahan untuk menepis bahaya tersebut maka orang tersebut dapat dipaksa untuk mengambil langkah-langkah pencegahan, namun dia tidak dapat dipaksa untuk melenyapkannya. Untuk lebih menguatkan dalam fatwa ini terdapat beberapa pendapat para ulama. Pendapat para ulama menyatakan bahwasannya syari'at Islam menjunjung tinggi berbagai kemaslahatan sebagai kewajiban ketika penyebab yang membawa kemafsadatan itu kuat maka dosanya menjadi besar melebihi dosa akibat penyebab yang ringan. Oleh karena itu jika suatu kerusakan benda yang ada kesamaannya maka diganti dengan benda yang sama pula, dan

jika suatu kerusakan benda yang hanya diketahui nilai harganya saja maka ia menggantinya dengan nilai harganya pula.<sup>31</sup>

## 2. Fatwa MUI Nomor 30 Tahun 2016 Tentang Hukum Pembakaran Hutan Dan Lahan Serta Pengendaliannya.

Terbitnya fatwa ini akan membimbing dan memberi tuntunan syariah kepada masyarakat khususnya umat Islam Indonesia dalam kaitannya mencegah terjadinya karhutla dimasa yang akan datang. bahwa persoalan lingkungan selain pengetahuannya adalah public campaignnya. Apalagi terkait kebakaran hutan dan lahan yang pengalaman empirik LHK, bahwa hukum materil saja tidak cukup apalagi hukum formal dan ada yang lebih penting adalah moral.<sup>32</sup>

Tentang hukum pembakaran hutan dan lahan serta pengendaliannya dalam fatwa ini dimaksud dengan " hutan adalah kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumberdaya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan yang lainnya tidak dapat di pisahkan. Lahan adalah suatu hamparan ekosistem daratan diluar kawasan hutan yang manfaatnya untuk usaha, kegiatan ladang dan/atau kebun bagi masyarakat. Pembakaran hutandan lahan adalah perbuatan manusia secara sengaja yang menyebabkan terbakarnya hutandan/atau lahan. Pengendalian kebakaran hutan dan lahan adalah tindakan pencegahan, penanggulangan dan penanganan kebakaran.

Oleh sebab itu MUI menetapkan beberapa poin yaitu :

---

<sup>31</sup>Fatwa MUI Nomor 30 Tahun 2016 Tentang *Hukum Pembakaran Hutan Dan Lahan Serta Pengendaliannya*

<sup>32</sup> Purbowaseso B, *Pengendalian Kebakaran Hutan Suatu Pengantar*, (Jakarta: PT Rinetka Cipta,2004) Hal.34.

1. Melakukan pembakaran hutan dan lahan yang dapat menimbulkan kerusakan, pencemaran lingkungan, kerugian orang lain, gangguan kesehatan dan dampak buruk lain, hukumnya haram;
2. Memfasilitasi, membiarkan, dan atau mengambil keuntungan dari pembakaran hutan dan lahan sebagaimana dimaksud pada angka satu, hukumnya haram;
3. Melakukan pembakaran hutan dan lahan sebagaimana dimaksud pada angka satu, merupakan kejahatan dan pelakunya dikenakan sanksi sesuai dengan tingkat kerusakan hutan dan lahan yang ditimbulkannya;
4. Pengendalian kebakaran hutan dan lahan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan umum hukumnya wajib.
5. Pemanfaatan hutan dan lahan pada prinsipnya boleh dilakukan dengan syarat-syarat sebagai berikut:
  - a. Memperoleh hak yang sah untuk pemanfaatan;
  - b. Mendapatkan izin pemanfaatan dari pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - c. Ditujukan untuk kemaslahatan;
  - d. Tidak menimbulkan kerusakan dan dampak buruk, termasuk pencemaran lingkungan.
6. Pemanfaatan hutan dan lahan yang tidak sesuai dengan syarat-syarat sebagaimana yang dimaksud pada angka lima, hukumnya haram.<sup>33</sup>

---

<sup>33</sup> Fatwa MUI Nomor 30 Tahun 2016 Tentang *Hukum Pembakaran Hutan Dan Lahan Serta Pengendaliannya*



### C. Dalil-dalil Hukum Pembakaran hutan Menurut Fatwa MUI Nomor 30 Tahun 2016

Di dalam fatwa ini juga terdapat dalil-dalil al Qur'an dan hadits seperti dibawah ini:

كُلُوا وَاشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعَثُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

”Makan dan minumlah rezki (yang diberikan) Allah, dan janganlah kamu berkeliaran di muka bumi dengan berbuat kerusakan.”

Dalam ayat tersebut diterangkan bahwa kita tidak diperbolehkan mencari rizki dengan cara merusak keindahan alam dan bertentangan dengan syariat Islam. Kita diperbolehkan untuk mencari rizki dengan apa yang sudah ada dengan cara tidak merusaknya. Berkenaan dengan itu Allah berfirman sebagai berikut:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي  
عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

Artinya : telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusi, supay Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).

Penjelasan dari ayat diatas sudah jelas bahwa ketika terjadi kerusakan Alam (ekologi) dan sistem (ekosistem) yang dibuat oleh tangan manusia. Kerusakan ini seolah menjadi bukti kekhawatiran malaikat bahwa manusia akan melakukan kerusakan di bumi dan menumpahkan darah. Allah menjamin, jika manusia berilmu dan tahu akibat dari apa yang diperbuat, ia tidak akan

melakukan kerusakan. Firman Allah SWT yang menjelaskan perintah tentang berbuat baik:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ  
وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya : Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.

Dalam ayat ini digambarkan hubungan manusia dan sosial kaum mukmin dunia yang berlandaskan pada keadilan, kebaikan yang menjauhkan dari segala kekhiliman dan arogansi. Bahkan hal itu disebut sebagai nasehat illahi yang harus dijaga oleh semua orang. Adil dan keadilan adalah landasan dari ajaran Islam dan syariat agama. Allah SWT tidak berbuat dzalim kepada siapapun dan juga tidak memperbolehkan seseorang berbuat zalim terhadap orang lain. Larangan berbuat yang membahayakan orang lain disebutkan dalam hadits sebagai berikut:

عن ابن عباس قال: قال رسول الله صل الله وسلم: "لا ضرر ولا ضرار" - رواه ابن ماجه والطبراني والبيهقي

Artinya : dari Ibnu 'Abbas ra, telah bersabda Rasulullah SAW : " tidak boleh membahayakan/merugikan diri sendiri dan orang lain." (H.R.Ibnu majah, al-Thabarani dan al-Baihaqi).

### **BAB III**

#### **PRAKTEK LAPANGAN**

##### **A. Profil Desa Bokor Kecamatan Rangsang Barat Kabupaten Kepulauan Meranti**

###### **1. Geografi Dan Demografi Desa Bokor**

###### **a. Geografi Desa Bokor**

Desa Bokor merupakan desa yang berada di Kecamatan Rangsang Barat Kabupaten Kepulauan Meranti. Desa Bokor memiliki luas wilayah  $43,14 \text{ km}^3$  (empat puluh tiga koma empat belas kilometer persegi). Desa ini berada di dataran rendah dengan ketinggian hanya dua meter di atas permukaan laut. Keberadaan desa ini dekat dengan laut dan sebagian wilayahnya terdiri dari pesisir pantai dan rawa-rawa. Sebagian besar wilayahnya adalah hutan dan sungai yang dekat perairan membuat desa ini kaya akan potensi hutan dan sungainya. Seperti sungai yang menjadi objek wisata utama Desa Bokor.

Secara administratif, Desa Bokor berada di wilayah Kecamatan Rangsang Barat, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau. Adapun batas-batas desa adalah sebagai berikut:

- (1) Utara: Desa Sendaar
- (2) Barat: Desa Telaga Baru
- (3) Selatan: Selat Air Hitam
- (4) Timur: Desa Kayu Ara

Sebagian besar wilayah Desa Bokor merupakan area perkebunan dan hutan. Area perkebunan sendiri memiliki luas 800-900 (delapan ratus sampai sembilan ratus) ha dengan 5 (lima) komposisi utama, yaitu: Perkebunan Durian, Perkebunan Karet, Perkebunan Kelapa, Perkebunan Manggis, dan Perkebunan Sagu, sedangkan area hutan terdiri dari dua jenis, yaitu: Hutan Desa dan Hutan Bakau. Hutan desa terletak di ujung barat laut desa. Hutan ini diapit oleh perkebunan karet dan kelapa. Adapun Hutan Bakau terletak di sebelah tenggara desa. Hutan ini tersebar di sepanjang Sungai Kicak dan pesisir Selat Air Hitam.

Secara iklim, Desa Bokor termasuk ke dalam iklim tropis. Di desa ini hanya terdapat dua musim dalam satu tahun, yaitu: musim kemarau dan musim hujan. Musim kemarau biasanya terjadi pada bulan Februari hingga Agustus setiap tahunnya. Sedangkan musim hujan umumnya terjadi pada September hingga Januari. Adapun curah hujan rata-rata di Desa Bokor sekitar 2.000-3.000 mm (dua ribu sampai tiga ribu milimete) per tahun. Tanah yang subur dan luas serta iklim yang cukup basah membuat Desa Bokor menjadi salah satu penghasil buah-buahan di Kepulauan Meranti.<sup>34</sup>

#### b. Demografi Desa Bokor

Jumlah penduduk Desa Bokor kecamatan rangsang barat berjumlah 3429 (tiga ribu empat ratus dua puluh sembilan) jiwa yang terdiri dari 960 KK (sembilan ratus enam puluh kepala keluarga).

---

<sup>34</sup> Pak Ramlan, Datok Desa Bokor Kecamatan Rangsang Barat Kabupaten Kepulauan Meranti, Wawancara Pribadi, Tanggal 27 Agustus 2017

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	1746 Jiwa
2	Perempuan	1674 Jiwa
	Jumlah	3420 Jiwa

Sumber Data Pokok Kecamatan Rangsang Barat 2017 Kerjasama Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Meranti

## 2. Jenis Mata Pencarian Dan Tingkat Ekonomi

Kegiatan perekonomian yang ada di Desa Bokor didominasi oleh sektor pertanian, dimana lahan pertanian yang ada di Desa Bokor mencapai lebih dari 40% (empat puluh persen) luas Desa Bokor. Kegiatan bertani ini dibagi menjadi 2 (dua) kategori, yaitu petani dan buruh tani. Petani merupakan para pekerja yang melakukan kegiatan tani untuk dinikmati sendiri hasilnya, sedangkan buruh tani merupakan para pekerja yang melakukan kegiatan tani untuk menggarap hutan yang belum dimiliki orang lain. Selain menjadi petani, masyarakat Desa Bokor bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil, guru, pedagang, bidan. Beberapa masyarakat pun bisa dianggap sudah memiliki tingkat ekonomi yang sangat mapan.

Namun, di sisi lain Desa Bokor mempunyai pendapatan perkapita yang sangat rendah yaitu hanya Rp 55.000.- (lima puluh lima ribu rupiah). Hal tersebut diakibatkan oleh banyaknya angkatan kerja dan kurangnya lapangan pekerjaan

yang ada didesa. Pendapatan masyarakat yang paling banyak adalah dari pertanian yaitu hanya Rp30.000.-/hari (tiga puluh ribu rupiah perhari).<sup>35</sup>

No	Mata Pencaharian	Jumlah
1	Petani Penggarap Tanah	386
2	Buruh Tani	50
3	Nelayan	40
4	Industri Kecil	3
5	Buruh I Ndustri	40
6	Buruh Bangunan	305
7	Buruh Perkebunan	280
8	Pedagang	39
9	PNS	34
10	ABRI / TNI	1
11	POLRI	1
12	Karyawan Honoror	112
13	Bidan	14
14	Bengkel	7
15	Peternak Sapi Biasa	48
16	Peternak Kambing	68
17	Peternak Bebek / Itik	8
18	Peternak Ayam	295
19	Dan Lain-Lain	659
		Jumlah Total: 2.390

Sumber Data Pokok Kecamatan Rangsang Barat 2017 Kerjasama Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Meranti

### 3. Agama dan Adat Istiadat

Negara Republik Indonesia merupakan Negara yang terkenal sebagai bangsa religius yaitu negara yang bangsanya tidak membenarkan tanpa menganut

---

<sup>35</sup> Ibu Devikha, Bendahara Desa Bokor Kecamatan Rangsang Barat Kabupaten Kepulauan Meranti, Wawancara Pribadi, Tanggal 30 Agustus 2017

agama atau kepercayaan. Hal ini tercantum dalam Undang - Undang Dasar 1945 pada pasal 29, yaitu :

- a. Negara berdasarkan atas ketuhanan Yang Maha Esa;
- b. Negaramenjamin kebebasan penduduk untuk memeluk agama dan berbadat menurut agama dan kepercayaannya.<sup>36</sup>

Beragama merupakan suatu kecenderungan bagi manusia yang didorong oleh sifatnya untuk mempercayai dan meyakini akan adanya suatu kekuatan yang menguasai melebihi kekuatan manusia.<sup>37</sup> Agama pada prinsipnya merupakan kebutuhan manusia sebab manusia diciptakan tuhan memiliki akal dan fikirian yang dapat membedakan yang baik dan yang buruk. Agama merupakan penghubungan manusia dengan tuhan dan hubungan dengan sosial kemasyarakatan diantara manusia, karena agama membekali perintah dan larangan dalam menempuh jalan kehidupan yang terbaik.<sup>38</sup> Dalam melaksanakan kegiatan agama masyarakat Desa Bokor telah membangun sarana tempat beribadah, baik berupa masjid, mushola maupun madrasah tempat anak-anak mengaji.

No.	Nama bangunan	Jumlah
1	Masjid	4 unit
2	Musholla	2 unit
3	Madrasah	2 unit
	Total	8 Unit

---

<sup>36</sup>Departemen Agama RI, *Proyek Pembinaan Kerukunan Hidup Beragama*, (Jakarta, 1983), Hal. 47.

<sup>37</sup> Abdullah Ali, *Agama Dan Ilmu Perbandingan*, (Bandung : Nuansa Aulia, 2007), Hal. 13.

<sup>38</sup> Mudjahid Abdul Manaf, *Sejarah Agama-Agama*, (Jakarta : PT Raja Grafindo, 1993), Hal 22

Sumber Data Pokok Kecamatan Rangsang Barat 2017 Kerjasama Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Meranti

Semua masyarakat Indonesia mempunyai adat, sebab adat istiadat itu merupakan aturan - aturan tentang beberapa segi kehidupan manusia yang tumbuh dari usaha orang dalam suatu daerah tertentu di Indonesia sebagai kelompok sosial untuk mengatur tata tertib pelaku anggota masyarakat.

Adat adalah gagasan kebudayaan yang terdiri dari nilai - nilai kebudayaan, norma, kebiasaan, kelembagaan, dan hukum adat yang lazim dilakukan di suatu daerah. Apabila adat ini tidak dilaksanakan akan terjadi keracunan yang menimbulkan sanksi tak tertulis oleh masyarakat setempat terhadap pelaku yang dianggap menyimpang.<sup>39</sup>

Tidak terkecuali di Desa Bokor ada beberapa suku yang berada di desa tersebut berdasarkan jumlah persen suku antara sebagai berikut :

No	Nama Suku	Jumlah
1	Melayu	2.568
2	Jawa	755
3	Batak	97

Sumber Data Pokok Kecamatan Rangsang Barat 2017 Kerjasama Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Meranti

#### 4. Pendidikan

Pendidikan adalah karunia pengetahuan yang tidak dapat dicuri dan dapat membantu setiap anak pada usia yang sangat muda untuk belajar mengembangkan

---

<sup>39</sup> H Hilman, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, (Bandung : Mandar Maju, 1992), Hal.10.



dan menggunakan kekuatan mental moral dan fisik mereka, yang mereka peroleh melalui berbagai jenis pendidikan. Pendidikan membawa pengetahuan kepada anak untuk mencapai puncak impiannya. Pendidikan sangat penting, bagi semua orang. Tingkat pendidikan membantu orang mendapatkan rasa hormat dan pengakuan. Ini adalah bagian tak terpisahkan dari kehidupan baik secara pribadi maupun sosial.<sup>40</sup>

Pendidikan sering disebut sebagai proses belajar dan memperoleh pengetahuan disekolah, dalam bentuk pendidikan formal. Namun, proses pendidikan tidak hanya dimulai ketika anak pertama kali bersekolah. Proses pendidikan telah dimulai pertama kali diruma. Seseorang tidak hanya memperoleh pengetahuan dari orang tua anggota keluarga sdan bahkan kerabat yang lainnya. Pendidikan merupakan salah satu upaya kita untuk menaggulangi kebodohan dan kemiskinan yang terjadi di Negara kita yaitu Indonesia, yang mana kita ketahui bersama bahwasannya dengan seseorang mengenyam bangku sekolah maka orang tersebut telah mengetahui berbagai hal yang ada didunia ini. Sebenarnya pendidikan itu dapat kita peroleh dimana saja dan kapan saja.<sup>41</sup>

Dengan adanya pendidikan orang akan mampu untuk menata masa depannya dengan bijaksana, dan dapat berfikir lebih kritis dalam memecahkan satu masalah yang terjadi didalam kehidupannya. Pendidikan merupakan prioritas pertama apabila ingin hidup lebih maju dan bahagia. Peningkat partisipasi sekolah

---

<sup>40</sup> Notoatmodjo Soekidjo, *Pendidikan Dan Perilaku Kesehatan*, (Jakarta :PT Rineka Cipta, 2003), Hal.11.

<sup>41</sup> Hasbullah, *Dasar Dasar Ilmu Pendidikan*, (Jakarta :Rajawali Pes,2001), Hal.3.

penduduk tertentu harus diimbangi dengan penyediaan sarana fisik pendidikan maupun tenaga guru yang memadai.

a. Pendidikan Dasar

Pendidikan dasar dimulai dari jenjang pendidikan sekolah dasar (SD/MI). Jumlah SD/MI ada sebanyak 5 (lima) sekolah di desa bokor dengan status SD/MI Negeri dan SD/MI swasta dengan jumlah guru 54 (lima puluh empat) orang.

b. Pendidikan Menengah

Jumlah Sekolah menengah Pertama SMP/MTs ada sebanyak 6(enam) sekolah dengan jumlah guru sebanyak 34 (tiga puluh empat) orang. Pada tahun yang sama sekolah menengah atas (SMA/MA).

## **B. Pengetahuan Dasar Kebakaran Hutan**

Salah satu hal penting yang perlu diketahui dalam kegiatan pengendalian kebakaran hutan adalah dengan mengenal faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kebakaran hutan tersebut. Dengan mengenali faktor-faktor tersebut, upaya awal dalam kegiatan pencegahan akan dapat dilakukan sedini mungkin.

Api adalah fenomena fisik alam yang dihasilkan dari kombinasi yang cepat antara oksigen dengan suatu bahan bakar yang menjelma dalam bentuk panas, cahaya dan nyala. Api dalam kebakaran merupakan gejala fisik alam yang terjadi karena adanya kombinasi antara api, oksigen dan bahan-bahan serta mempunyai karakteristik yaitu bersifat panas, bersinar dan biasanya menyala. Api merupakan unsur yang dapat bermanfaat dan dapat pula menimbulkan kerugian bagi manusia secara umum terjadinya kebakaran ditimbulkan oleh adanya dua faktor, yaitu

bunga api (sumber api dan zat asam) dan faktor penampung api (yang menjadi sasaran api).

Kebakaran adalah bencana yang tidak dikehendaki bersama, karena dapat menimbulkan bencana bagi masyarakat. Sedangkan kebakaran hutan adalah suatu keadaan dimana hutan dilanda api sehingga mengakibatkan kerusakan hutan dan atau hasil hutan yang menimbulkan kerugian ekonomis dan atau nilai lingkungan. Kebakaran hutan dibedakan dengan kebakaran lahan. Kebakaran hutan yaitu kebakaran yang terjadi di dalam kawasan hutan, sedangkan kebakaran lahan adalah kebakaran yang terjadi di luar kawasan hutan.<sup>42</sup>

### **C. Penyebab Kebakaran Hutan**

Sebab-sebab timbulnya kebakaran sangat penting untuk diketahui guna merencanakan penanggulangannya dan cara memadamkannya. Penyebab kebakaran hutan didefinisikan sebagai sesuatu yang bersifat alami maupun perbuatan manusia yang menyebabkan terjadinya proses penyalaan serta pembakaran bahan bakar hutan dan lahan. Penyebab kebakaran hutan didefinisikan sebagai sesuatu yang bersifat alami maupun perbuatan manusia yang menyebabkan terjadinya proses penyalaan serta pembakaran bahan bakar hutan dan lahan.<sup>43</sup>

---

<sup>42</sup> Syaufina L. *Kebakaran Hutan dan Lahan di Indonesia*. (Malang: Bayumedia Publishing, 2008), Hal. 42-50.

<sup>43</sup> Widyaastuti Suwardi, *Dasar-Dasar Perlindungan Hutan*, (Yogyakarta. Gadjadara University Press, 2007), Hal. 45.

Kebakaran hutan dan lahan bisa terjadi baik disengaja maupun tanpa disengaja. Dengan kata lain, terjadinya kebakaran hutan dan lahan dapat diakibatkan oleh faktor kesengajaan manusia melalui beberapa kegiatan, seperti kegiatan perladangan, perkebunan, hutan tanaman industri (HTI), penyiapan lahan untuk ternak sapi, dan sebagainya. Faktor kebakaran hutan dan lahan karena kesengajaan ini merupakan faktor utama dan 90% (sembilan puluh persen) kebakaran hutan dan lahan yang terjadi saat ini banyak disebabkan oleh faktor ini.<sup>44</sup>

a. Faktor alam

Kebakaran hutan dan lahan yang dapat terjadi secara alami antara lain disebabkan oleh beberapa faktor, seperti petir, letusan gunung berapi, atau batu bara yang terbakar.<sup>45</sup>

b. Bahan Bakar

Menurut Purbowaseso, ada lima sifat bahan bakar yang mempengaruhi proses terjadinya kebakaran yaitu ukuran bahan bakar, susunan bahan bakar, volume bahan bakar, jenis bahan bakar serta kandungan kadar air dan kimiawi bahan bakar.<sup>46</sup>

---

<sup>44</sup>Cecep Triwibowo, *Etika Dan Hukum Kesehatan* (Yogyakarta: Nuha Medika,2014),Hal.87.

<sup>45</sup> Muhammad Akib, *Hukum Lingkungan Prespektif Global Dan Nasional* (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada. 2014) Hal.136.

<sup>46</sup> Nandika Dodi, *Hutan Bagi Ketahanan Nasional*, ( Surakarta : Muhammadiyah University Press,2005) Hal.44-46.

### c. Cuaca

Faktor-faktor cuaca yang penting menyebabkan kebakaran hutan adalah angin, suhu, curah hujan, keadaan air tanah dan kelembaban relatif.<sup>47</sup>

### d. Topografi

Topografi adalah gambaran permukaan bumi yang meliputi relief dan posisi alamnya serta ciri-ciri yang merupakan hasil dari bentukan manusia. Faktor topografi merupakan salah satu faktor yang bisa ikut berperan dalam kebakaran hutan dan lahan. Ada tiga faktor topografi yang biasanya berperan penting yaitu kemiringan, arah lereng (aspek) dan medan (*terrain*).<sup>48</sup>

### e. Faktor Manusia

Baik di areal HTI, hutan alam dan perladangan berpindah dapat dikatakan bahwa 99% (sembilan puluh sembilan persen) penyebab kebakaran hutan di Indonesia adalah berasal dari ulah manusia, entah itu sengaja dibakar atau karena api lompat yang terjadi akibat kelalaian pada saat penyiapan lahan.

Kebakaran hutan dan lahan di Indonesia, yang disebabkan oleh manusia dimulai sejak terjadinya krisis moneter yang menimbulkan kericuhan besar dalam perekonomian masyarakat sekitar hutan. Pada tahun 1997 membuat pertumbuhan ekonomi turun drastis, untuk mengatasi hal ini pilihan pada peningkatan pemanfaatan sumberdaya alam (kehutanan dan pertanian). Pengembangan

---

<sup>47</sup>Mohammad Noor, *Lahan Gambut Pengembangan, Konservasi Dan Perubahan Iklim*, (Yogyakarta : Gadjadara University Press, 2010) Hal.12-15.

<sup>48</sup>H.S Salim, *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan*, ( Jakarta : Sinar Grafika , 2013), Hal. 65-67.

perkebunan kelapa sawit, coklat, lada dan lain-lain merupakan faktor penting dalam konversi lahan. Di sektor kehutanan berupa tingkat produksi kayu, rencana pembangunan HTI dan konversi lahan untuk kegiatan non-kehutanan termasuk untuk transmigrasi.

Pengangguran yang meningkat di perkotaan diduga terjadi *deurbanisasi*. Ada kecenderungan kondisi ini memaksa orang untuk melakukan pertanian ekstensif dengan membuka lahan secara luas, selain itu kemiskinan di pedesaan mendorong peningkatan eksploitasi hutan. Kebijakan mendorong usaha agribisnis (terutama kelapa sawit) dapat menimbulkan dampak sosial, banyak kasus masyarakat dirugikan yang pada gilirannya terjadi kasus pembakaran lahan.<sup>49</sup>

Beberapa motivasi manusia untuk menimbulkan api di hutan bermacam-macam, misalnya :

- 1) Perladangan berpindah, yang masih merupakan kegiatan yang dilakukan oleh sebagian masyarakat yang hidup di dalam hutan.
- 2) Pembakaran alang-alang dalam rangka melaksanakan reboisasi di lahan kritis, yang seringkali atau terkadang tidak dapat dikendalikan lagi sehingga berakibat pada terjadinya kebakaran yang luas.
- 3) Pembakaran alang-alang pada padang penggembalaan dengan tujuan mendapatkan rumput-rumput baru yang segar sebagai pakan ternak.

---

<sup>49</sup> Mohammad Noor, *Lahan Gambut Pengembangan, Konservasi Dan Perubahan Iklim*, ( Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 2010), Hal. 12.

- 4) Perburuan binatang liar di hutan yang sering terjadi dan umumnya disertai dengan membuat sumber api, baik untuk menghangatkan diri ataupun untuk merangsang hewan buruan.
- 5) Rekreasi dan perkemahan di hutan yang kurang hati-hati sehingga dapat mengakibatkan menjalarnya sisa sumber api yang ditinggalkan.
- 6) Khusus untuk hutan di Pulau Jawa sering dijumpai adanya unsur kesengajaan membakar hutan sebagai akibat dari adanya rasa sakit hati kepada petugas pengelola hutan, pengalihan perhatian petugas untuk mempermudah pengambilan *rencek* (kayu bakar), merangsang turunnya hujan dan sebagainya.

f. Faktor Pendukung

Beberapa faktor pendukung yang dapat memperbesar tingkat bahaya kebakaran antara lain adalah faktor politik, ekonomi, fisiografis, sosiokultural dan institusi. Termasuk ketidaklengkapan kebijakan dan konflik dalam penggunaan tanah, kepastian masa kelola dan pembangunan ekonomi.

#### **D. Pengendalian Kebakaran Hutan**

Pengendalian adalah kegiatan mengatur, mengarahkan, mengikuti/memantau semua kegiatan agar sesuai dengan rencana, peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan serta menemu kenali dan mencari pemecahannya untuk digunakan sebagai umpan balik bagi penyempurnaan pelaksanaan dan perencanaan dalam upaya pencapaian sasaran yang telah ditetapkan Kepdirjen 51/Kpts/V/1997.

Pengendalian kebakaran hutan adalah berbagai kegiatan yang dilakukan untuk mencegah dan membatasi kerusakan hutan yang disebabkan oleh kebakaran. Kegiatan tersebut meliputi pencegahan, pemadaman dan penanganan pasca kebakaran.<sup>50</sup>

Peraturan Pemerintah No.45 Tahun 2004, menjelaskan bahwa kegiatan pengendalian kebakaran hutan dilakukan pada tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota dan unit atau kesatuan pengelolaan hutan. Dimana rincian tanggung jawab atas kegiatan pengendalian kebakaran hutan tersebut dijabarkan sebagai berikut:

1. Pengendalian kebakaran hutan tingkat nasional dilakukan dan ditetapkan serta menjadi tanggung jawab Menteri.
2. Pengendalian kebakaran hutan tingkat provinsi dilakukan dan ditetapkan serta menjadi tanggung jawab Gubernur.
3. Pengendalian kebakaran hutan tingkat kabupaten/kota dilakukan dan ditetapkan serta menjadi tanggung jawab Bupati/Walikota.
4. Pengendalian kebakaran hutan tingkat kesatuan pengelolaan hutan dilakukan dan ditetapkan serta menjadi tanggung jawab Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan.

Dalam pelaksanaannya, Pemerintah membentuk lembaga pengendalian kebakaran hutan pada tingkat pusat, provinsi, kabupaten dan unit pengelolaan hutan yang disebut Brigade Pengendalian Kebakaran Hutan (Brigdalkarhut).

---

<sup>50</sup>[http://www.inovasiaonline.com/web\\_ftnki/pg\\_articles.asp?sub=soc&ID=138](http://www.inovasiaonline.com/web_ftnki/pg_articles.asp?sub=soc&ID=138) pada Tanggal 26 Februari 2019



Brigade tersebut bertugas untuk menyusun dan melaksanakan program pengendalian kebakaran hutan.

#### **E. Pencegahan dan Persiapan Pemadaman Kebakaran Hutan**

Pengendalian kebakaran hutan (*forest fire*) tidaklah hanya meliputi aktivitas dalam pemadamannya saja, tetapi juga meliputi pencegahan dan aktivitas persiapan pemadaman kebakaran.

Peraturan Pemerintah No.45 Tahun 2004, menjelaskan bahwa dalam rangka pencegahan kebakaran dilakukan kegiatan:

1. Pada tingkat nasional, antara lain: Membuat peta kerawanan kebakaran hutan nasional; Mengembangkan sistem informasi kebakaran hutan; Menetapkan pola kemitraan dengan masyarakat; Menetapkan standar peralatan pengendalian kebakaran hutan; Membuat program penyuluhan dan kampanye pengendalian kebakaran; Menetapkan pola pelatihan pencegahan kebakaran; Melaksanakan pembinaan dan pengawasan.
2. Pada tingkat provinsi, antara lain: Membuat peta kerawanan kebakaran hutan provinsi; Membuat model-model penyuluhan; Melaksanakan pelatihan pencegahan kebakaran hutan; Membuat petunjuk pelaksanaan pemadaman kebakaran hutan; Mengadakan peralatan pemadam kebakaran hutan; Melaksanakan pembinaan dan pengawasan.
3. Pada tingkat kabupaten/kota, antara lain: Melakukan evaluasi lokasi rawan kebakaran hutan; Melaksanakan penyuluhan; Membuat petunjuk teknis pelaksanaan pemadaman kebakaran hutan; Mengadakan peralatan pemadam kebakaran hutan; Melaksanakan pembinaan dan pengawasan.

4. Pada tingkat kesatuan pengelolaan hutan produksi, kesatuan pengelolaan hutan lindung, izin pemanfaatan hutan, izin penggunaan kawasan hutan dan hutan hak, antara lain: Melakukan inventarisasi lokasi rawan kebakaran hutan; Menginventarisasi faktor penyebab kebakaran hutan; Menyiapkan regu-regu pemadam kebakaran; Membuat prosedur tetap pemadaman kebakaran hutan; Mengadakan sarana pemadaman kebakaran hutan; Membuat sekat bakar.
5. Pada tingkat kesatuan pengelolaan hutan konservasi, antara lain: Melakukan inventarisasi lokasi rawan kebakaran hutan; Menginventarisasi faktor penyebab kebakaran hutan; Menyiapkan regu-regu pemadam kebakaran; Membuat prosedur tetap pemadaman kebakaran hutan; Mengadakan sarana pemadaman kebakaran hutan; Membuat sekat bakar.

Tindakan pemadaman kebakaran hutan baru dapat dilakukan apabila telah diketahui adanya kebakaran hutan dan diketahui pula letaknya. Selanjutnya agar usaha pemadaman dapat berlangsung dengan cepat dan efisien, maka perlu diadakan persiapan-persiapan sebelum pemadaman yang meliputi dalam hal : penyediaan alat untuk mengetahui adanya kebakaran hutan, penyediaan alat komunikasi, penyediaan alat angkutan, persiapan alat pemadam kebakaran hutan.

Alat pemadam kebakaran hutan dan lahan yang perlu dipersiapkan pada dasarnya dibedakan atas : peralatan perorangan (peralatan tangan), peralatan kelompok/regu, peralatan bantuan, sarana bantuan nasional, pembentukan

organisasi dan anggota team (personil). Mengadakan latihan untuk anggota team.<sup>51</sup>

## **F. Pemadaman Kebakaran Hutan**

Prinsip pemadaman kebakaran hutan terdiri atas dua langkah. Langkah pertama adalah menghentikan menjalarnya api, kemudian baru langkah kedua yaitu memadamkan api. Hal yang pertama-tama harus dilakukan di lokasi kebakaran hutan dan lahan adalah melakukan perhitungan (*size up*) terhadap seluruh situasi untuk menentukan cara terbaik memadamkan api. Hal ini perlu melaksanakan suatu inspeksi ke seluruh areal yang terbakar, sehingga bisa dilihat secara keseluruhan kondisi kebakaran yang terjadi. Hal ini sangat membantu dalam melaksanakan kegiatan pemadaman yang dikerjakan, tanpa mengetahui kondisi kebakaran yang terjadi, maka jelas tidak akan efektif pelaksanaan pemadamannya.<sup>52</sup>

Peraturan Pemerintah No.45 Tahun 2004, menjelaskan bahwa rangkaian tindakan pemadaman kebakaran hutan yang perlu dilakukan terbagi menjadi 6 macam sesuai tingkatan pengelolaannya, yaitu:

- a. Pemegang Izin Pemanfaatan Hutan, pemegang izin penggunaan kawasan hutan, pemilik hutan hak dan atau kepala kesatuan pengelolaan hutan, berkewajiban melakukan rangkaian tindakan pemadaman dengan cara: melakukan deteksi terjadinya kebakaran hutan; mendayagunakan seluruh

---

<sup>51</sup> Peraturan Pemerintah RI Nomor 45 Tahun 2004 *Perlindungan Hutan*. Jakarta: Sekretariat Jenderal Departemen Kehutanan.

<sup>52</sup> P. Joko Subagyo, *Hukum Lingkungan : Masalah Dan Penanggulangannya* (Jakarta: PT.Rineka Cipta.2002).Hal.23.

sumberdaya yang ada; membuat sekat bakar dalam rangka melokalisir api; memobilisasi masyarakat untuk mempercepat pemadaman.

- b. Pemegang Izin Pemanfaatan Hutan, pemegang izin penggunaan kawasan hutan, pemilik hutan hak dan atau kepala kesatuan pengelolaan hutan melakukan: koordinasi dengan instansi terkait dan tokoh masyarakat dalam rangka mempercepat pemadaman, evakuasi, ligitasi dan mencegah bencana; pelaporan kepada bupati/walikota tentang kebakaran hutan yang terjadi dan tindakan pemadaman yang dilakukan. berdasarkan laporan kebakaran hutan, bupati/walikota melakukan: deteksi terjadinya kebakaran hutan; mobilisasi brigade pemadam kebakaran dan koordinasi instansi terkait dan tokoh masyarakat: penyampaian laporan kepada gubernur dan menteri tentang kebakaran hutan yang terjadi, tindakan yang sudah dan akan dilakukan.
- c. Berdasarkan informasi dan atau laporan kebakaran hutan, gubernur melakukan: deteksi terjadinya kebakaran hutan; mobilisasi brigade pemadam kebakaran dan koordinasi instansi terkait dan tokoh masyarakat; penyampaian laporan kepada menteri tentang kebakaran hutan yang terjadi, tindakan yang sudah dan akan dilakukan.
- d. berdasarkan informasi dan atau laporan kebakaran hutan, menteri melakukan: deteksi terjadinya kebakaran hutan; koordinasi dan mobilisasi tenaga, sarana dan prasarana kebakaran hutan.
- e. Dalam rangka koordinasi dan mobilisasi pemadaman kebakaran hutan, menteri membentuk pusat pengendalian operasi kebakaran hutan.

#### **G. Penanganan Pasca Kebakaran**

Peraturan Pemerintah No.45 Tahun 2004, menjelaskan bahwa dalam rangka penanganan pasca kebakaran hutan dilakukan kegiatan yang meliputi:

- a. Identifikasi dan evaluasi. kepala kesatuan pengelolaan hutan, pemegang izin pemanfaatan hutan, pemegang izin penggunaan kawasan hutan, atau pemilik hutan hak melakukan kegiatan identifikasi dan evaluasi yang berupa: pengumpulan data dan informasi terjadinya kebakaran; pengukuran dan sketsa lokasi kebakaran; analisis tingkat kerusakan dan rekomendasi.
- b. Rehabilitasi. kegiatan rehabilitasi dilakukan oleh kepala kesatuan pengelolaan hutan, pemegang izin pemanfaatan hutan, pemegang izin penggunaan kawasan hutan, atau pemilik hutan hak.
- c. penegakan hukum (tanggungjawab pidana dan perdata). pemegang izin pemanfaatan hutan, pemegang izin penggunaan kawasan hutan atau pemilik hutan hak bertanggung jawab atas terjadinya kebakaran hutan di areal kerjanya, yang meliputi: tanggungjawab pidana; tanggungjawab perdata; membayar ganti rugi sanksi administrasi. penegakan hukum terhadap tindak pidana kebakaran hutan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>53</sup>

---

<sup>53</sup> Ibid, Peraturan Pemerintah RI Nomor 45 Tahun 2004 *Perlindungan Hutan*.

## **BAB IV**

### **Analisis Penerapan Fatwa MUI Nomor 30 Tahun 2016 Tentang Hukum Pembakaran Hutan Dan Lahan Serta Pengendaliannya**

#### **A. Penerapan fatwa MUI Nomor 30 Tahun 2016 di Kecamatan Rangsang Barat**

Pemahaman masalah lingkungan hidup dan penanganannya perlu diletakkan di atas suatu pondasi moral untuk mendukung segala upaya yang sudah dilakukan dan dibina selama ini yang ternyata belum mampu mengatasi kerusakan lingkungan hidup yang sudah ada dan masih terus berlangsung. Pemerintah berupaya menyadarkan masyarakat supaya sadar bahwa masalah lingkungan hidup tidak dapat dilepaskan dari tanggung jawab sendiri manusia yang beriman dan merupakan amanat yang diembannya untuk memelihara dan melindungi alam yang dikaruniakan Sang pencipta yang Maha pengasih dan penyayang sebagai hunian tempat manusia dalam menjalani hidup di bumi ini.<sup>54</sup>

Kerusakan lingkungan hidup yang telah terjadi di berbagai wilayah di Indonesia mendorong para ulama bersatu menyerukan keprihatinan serta kepedulian mereka akan kelestarian lingkungan hidup. Hukum yang mengatur pembakaran hutan di Indonesia sebenarnya sudah ada dan tertuang dalam undang-undang (UU). Karena itu, fatwa MUI ini akan menjadi ketentuan hukum tambahan yang diambil dari sisi moral, yang penentuannya didasarkan kepada

---

<sup>54</sup> Al-Munawar, Said Agil, *Hukum Islam Dan Pluralitas Sosial*, (Jakarta: Penamadani, 2004), Hal.23.

Alquran dan hadis. Seperti yang terdapat dalam Fatwa MUI Nomor 30 Tahun 2016 Tentang Pembakaran Hutan Dan Lahan Serta Pengendaliannya.

1. Melakukan pembakaran hutan dan lahan yang dapat menimbulkan kerusakan, pencemaran lingkungan, kerugian orang lain, gangguan kesehatan dan dampak buruk lain, hukumnya haram;
2. Memfasilitasi, membiarkan, dan atau mengambil keuntungan dari pembakaran hutan dan lahan sebagaimana dimaksud dalam poin pertama, hukumnya haram;
3. Melakukan pembakaran hutan dan lahan sebagaimana dimaksud dalam poin pertama merupakan kejahatan dan pelakunya dikenakan sanksi sesuai dengan tingkat kerusakan hutan dan lahan yang ditimbulkannya;
4. Pengendalian kebakaran hutan dan lahan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan umum hukumnya wajib.
5. Pemanfaatan hutan dan lahan pada prinsipnya boleh dilakukan dengan syarat-syarat sebagai berikut :
  - a. Memperoleh hak yang sah untuk pemanfaatan;
  - b. Mendapatkan izin pemanfaatan dari pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - c. Ditujukan untuk kemaslahatan;
  - d. Dan tidak menimbulkan kerusakan serta dampak buruk termasuk pencemaran lingkungan.

6. Pemanfaatan hutan dan lahan yang tidak sesuai dengan syarat-syarat sebagaimana yang dimaksud dalam poin kelima hukumnya haram.<sup>55</sup>

MUI menekankan bahwa fatwa ini dibahas guna menetapkan kejelasan hukum syariah atas suatu perbuatan yang menyebabkan terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Oleh karenanya fatwa ini akan menjadi pelengkap peraturan pemerintah dalam pencegahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan.<sup>56</sup>

Melalui penelitian yang penulis lakukan, Fatwa MUI telah memperoleh deskripsi masalah secara lengkap guna merumuskan tentang sebab musabab kebakaran hutan dan lahan baik secara teknis, sosial dan ekonomis. Penetapan hukum syariah oleh MUI pusat akan memberikan landasan hukum bagi para dai dan mubaligh dalam mendorong masyarakat untuk melakukan tindakan preventif karhutla. Pendekatan yang dilakukan adalah melalui bahasa keagamaan dan budaya lokal sehingga mudah diterima seluruh lapisan masyarakat dibandingkan dengan pendekatan melalui penjelasan peraturan pemerintah.

Dalam fatwa juga telah menetapkan hukum apa saja yang boleh dilakukan dan hal-hal apa saja yang dilarang, sehingga ini adalah merupakan amal ibadah dan sarana untuk mencapai umat yang ber *akhlaqul karimah* dalam menjalankan syariat agama termasuk melindungi alam semesta.

---

<sup>55</sup><https://news.detik.com/berita/d-3296899/fatwa-mui-bakar-hutan-dan-merusak-lingkungan-adalah-haram> di akses pada Tanggal 26 Februari 2019

<sup>56</sup><https://mui.or.id/berita/mui-kalbar-haram-hukumnya-bakar-lahan-apapun-alasannya/> diakses Pada Tanggal 26 Februari 2019



Fatwa MUI ditujukan untuk mencapai kemaslahatan untuk seluruh makhluk hidup melalui keseimbangan sosial-ekonomi-lingkungan hidup. Pendekatannya selain penyadaran melalui penjelasan perintah agama (dakwah bil lisan) juga diikuti dengan tindakan nyata (dakwah bil hal) berupa pencegahan kerusakan serta pemberdayaan ekonomi masyarakat disekitar hutan. Karena fatwa MUI berlaku untuk seluruh lapisan masyarakat, maka fatwa MUI akan memuat beberapa rekomendasi yang ditujukan kepada pemerintah pusat, legislatif, pemerintah daerah, pengusaha, masyarakat, dan tokoh agama.<sup>57</sup>

## **B. Faktor Yang Mempengaruhi Masyarakat Melakukan Pembakaran Hutan**

Di antara sekelumit kisah tentang derita bencana kemarau panjang, kisah tentang penderitaan kekeringan memang masih menjadi headline di antara perbincangan masyarakat. Namun nyatanya, ada pula darurat bencana lain yang menghadang, bahkan menjadi semakin parah beberapa pekan terakhir, yaitu kebakaran hutan.<sup>58</sup>

Kebakaran hutan paling besar terjadi di area hutan sepanjang timur Sumatera. Posisi kedua ditempati oleh catatan kejadian kebakaran hutan di Pulau Kalimantan. Umumnya, kebakaran hutan terjadi karena dua faktor, faktor alam dan faktor manusia. Jika melihat catatan kebakaran hutan yang terjadi dalam

---

<sup>57</sup> Tim Penyusun, *Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Perspektif Hukum Dan Perundang-Undangan*, (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang Dan Diklat Kementerian Agama RI, 2012)

<sup>58</sup> Daud Silalahi, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Di Indonesia* (Bandung PT Alumni, 2001), Hal. 34.

beberapa pekan terakhir, dapat disimpulkan merupakan akumulasi dari dua faktor utama: karena musim kemarau panjang ditambah dengan fenomena El Nino, dan juga dipicu oleh pembakaran sengaja yang dilakukan oleh warga.<sup>59</sup>

Berdasarkan dari hasil wawancara dan observasi yang dilakukan penulis, setidaknya ada beberapa faktor penyebab sebagian masyarakat kecamatan meranti melakukan pembakaran hutan, yakni sebagai berikut :

- a) Tradisi turun termurun
- b) Sempitnya lapangan pekerjaan
- c) Membuka lahan baru<sup>60</sup>

Kebakaran hutan oleh faktor manusia kasusnya akan menjadi lebih kompleks. Dalam hal ini faktor sosial ekonomi dan ketidaktahuan penduduk merupakan pendorong utama atas terjadinya kebakaran hutan. Penyebab langsung kebakaran hutan yaitu: Api digunakan dalam pembukaan lahan; Api digunakan sebagai senjata dalam permasalahan konflik tanah; Api menyebar secara tidak sengaja; Api yang berkaitan dengan ekstraksi sumberdaya alam. Penyebab tidak langsung kebakaran hutan yaitu : Penguasaan lahan; Alokasi penggunaan lahan; Insentif-dis-insentif ekonomi; Degradasi hutan dan lahan; Dampak dari perubahan karakteristik kependudukan; Lemahnya kapasitas kelembagaan.<sup>61</sup>

---

<sup>59</sup> Abdul Khakim, *Pengantar Hukum Kehutanan Indonesia (Dalam Era Otonomi Daerah)*, Cet.1, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2005), Hal.5.

<sup>60</sup> Hasil Olahan Wawancara Dengan Pak Manan Ketua Rt Desa Bokor Kecamatan Rangsang Barat Pada Tanggal 22 Agustus 2018

<sup>61</sup> Syaufina L. *Kebakaran Hutan dan Lahan di Indonesia*. Hal.49-52.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bahkan memberikan kesimpulan motif dan modus pembakaran hutan yang marak terjadi di Sumatera, khususnya Provinsi Riau ternyata 99 % nya adalah perbuatan yang disengaja, berikut adalah fakta seputar faktor penyebab kebakaran hutan yang dilakukan dengan sengaja:

- (1) Pembakaran untuk membuka lahan yang tak terkendali sehingga merembet kemana-mana. Di area kawasan hutan luas Pulau Sumatera, pembukaan lahan makin sering terjadi. Baik itu dilakukan oleh Perusahaan melalui izin resmi ataupun dilakukan oleh masyarakat yang seringkali ilegal. Jika pembakaran lahan dilakukan dalam skala besar, bisa dipastikan kebakaran hutan akan merembet ke kawasan lain sehingga sulit terkendali.
- (2) Pembukaan lahan akan semakin berisiko di wilayah yang sangat rentan terjadi kebakaran hutan dalam skala besar, misalnya di wilayah lahan yang mayoritas terdiri dari lahan kering, gambut.
- (3) Rumitnya konflik kepemilikan lahan dan hutan antara pemerintah, masyarakat, dan perusahaan. Biasanya jika sudah berkonflik maka pihak yang paling arogan akan pertama kali memulai membakar lahan mengusir siapapun yang berada di atasnya ataupun mengaku memilikinya.
- (4) Kebakaran lahan atau hutan membuat nilainya menjadi terdegradasi. Ini merupakan cara licik yang sering diterapkan perusahaan kelapa sawit di wilayah hutan luas Pulau Sumatera, mereka menyewa orang-orang yang tak mengerti apa-apa dari luar negeri untuk bekerja dan membakar lahan

dengan sengaja, sehingga nilai lahan yang tadinya milik warga setempat menjadi terdegradasi. Dengan demikian perusahaan akan lebih mudah dalam mengambil alih lahan dengan membayar ganti rugi yang jauh lebih rendah dari nilai sebelum lahan terbakar.

- (5) Pada beberapa kasus, pembakaran lahan pun dilakukan oleh masyarakat setempat. Motifnya macam-macam, bisa berupa ajang balas dendam dengan perusahaan kelapa sawit yang telah merampas hak milik warga atas lahan, atau terpaksa membakar hutan sebagai alternatif paling murah, mudah, dan cepat untuk membuka lahan baru demi pertanian, atau perkebunan.
- (6) Faktor ekonomi masyarakat lokal. Masyarakat lokal yang ingin membuka lahan dan hanya memiliki sedikit biaya biasanya melakukan cara instan untuk membuka lahan. Mereka membakar hutan untuk membuka lahan baru. Cara tersebut dianggap lebih mudah dan murah meski akibat yang ditimbulkan sangat berbahaya bagi lingkungan dan kesehatan dan akan lebih mudah menjadi penyebab pencemaran udara.
- (7) Kurangnya penegakan hukum. Meskipun aturan mengenai pembakaran hutan jelas-jelas dilarang, namun karena hukum yang diberikan bagi yang melanggar masih sangat lemah, akibatnya banyak juga oknum yang melanggar aturan dan membakar hutan secara besar-besaran untuk membuka lahan. Hal tersebut biasanya dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar.

(8) Meninggalkan bekas api unggun atau membuang puntung rokok di hutan.

Hal ini biasa terjadi ketika seorang pendaki gunung atau seseorang yang melakukan perjalanan dalam hutan. Api unggun yang dinyalakan biasanya ditinggalkan begitu saja sehingga berpotensi menyebabkan kebakaran.<sup>62</sup>

Melalui observasi yang dilakukan penulis, pembakaran hutan merupakan cara yang paling murah untuk mengubah lahan hutan menjadi kebun kelapa sawit, sekaligus mendongkrak harga lahan bahwa terjadi kenaikan harga lahan sekitar Rp 3.000.000.- (tiga juta rupiah) setelah pembakaran lahan. Sebelum terbakar, harga lahan berkisar Rp 8.000.000.- (delapan juta rupiah), dan setelah terbakar menjadi Rp 11.000.000.-/ha (sebelas juta rupiah per hektar). Setelah ditanami sawit, harganya berlipat lagi, sekitar Rp 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah), dan bisa mencapai Rp 100.000.000.-/ha (seratus juta rupiah per hektar) apabila ditanami sawit bibit unggul karenanya banyak masyarakat di luar sana yang menderita kerugian akibat kabut asap, sekelompok orang justru menikmati hasil dari kebakaran hutan.<sup>63</sup>

Mereka adalah orang pengejar keuntungan ekonomi dari pembakaran seperti kelompok tani, pengklaim lahan, perantara penjual lahan, dan investor sawit. Pihak yang paling mengetahui informasi pembakaran hutan adalah pemerintah kabupaten, kecamatan, desa, dan LSM lokal. Pemerintah desalah yang mengeluarkan surat keterangan tanah untuk kebun sawit baru.<sup>64</sup>

---

<sup>62</sup> Hasil Olahahan Wawancara Dengan Ibu Susan Guru Ips Sma Desa Bokor Kecamatan Rangsang Barat Pada 12 Juni 2017

<sup>63</sup> Hasil Olahan Wawancara Dengan Pak Burhan Pada Tanggal 20 Juli 2017

<sup>64</sup> Hasil Olahan Wawancara Dengan Pak Jawi Pada Tanggal 23 Juli 2017

Saat ini kelapa sawit menjadi "emas hijau" yang banyak diincar investor, dari mulai perusahaan raksasa hingga investor perorangan karena merupakan investasi paling menguntungkan. Karenanya, pembakaran hutan, merupakan cara menghasilkan uang dengan mudah. Solusinya, adalah memutus jaringan para pemburu keuntungan ekonomi dari pembakaran hutan, dari petani ke investor, menyusun tata ruang dan lahan, serta penegakan supremasi hukum.<sup>65</sup>

Faktor sosial ekonomi masyarakat berpengaruh langsung terhadap kemampuan daya dukung lingkungan suatu daerah. Sebagai indikatornya bahwa semakin tinggi jumlah penduduk suatu daerah dan semakin rendahnya tingkat pendapatan penduduk, akan semakin kecil pula daya dukung lingkungan daerah tersebut. Masyarakat di sekitar hutan yang umumnya hidup serba kekurangan apabila tidak ditunjang dengan pendidikan dan kesadaran yang tinggi akan arti dan fungsi hutan, akan cenderung mendatangkan kerusakan bagi hutan.

Sejumlah faktor yang dapat memperbesar kemungkinan timbulnya kebakaran dan terhadap besarnya nyala api kebakaran hutan yaitu:

- a. Masyarakat kurang menyadari akan bahaya-bahaya dan akibat dari suatu kebakaran hutan.
- b. Usaha pencegahan kebakaran hutan oleh pihak kehutanan yang belum memadai.
- c. Masih kurangnya petugas khusus yang terdidik dan terlatih untuk menangani masalah kebakaran hutan.

---

<sup>65</sup> Hasil Olahan Wawancara Dengan Pak Mulang Pada Tanggal 23 Juli 2017

- d. Belum tersedianya peralatan-peralatan khusus untuk pencegahan dan pemadaman kebakaran hutan.
- e. Makin luasnya tanaman hutan dari jenis pohon yang mudah terbakar dan pada umumnya ditanam secara murni.
- f. Tanaman hutan pada areal alang-alang yang mudah terbakar.
- g. Adanya aktivitas masyarakat di dekat hutan yang menggunakan api (berkemah, pencuri kayu, membawa obor dan sebagainya).<sup>66</sup>

### **C. Faktor Tidak Diterapkannya Fatwa MUI Nomor 30 Tahun 2016**

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi tidak diterapkannya Fatwa MUI Nomor 30 Tahun 2016 yaitu :

#### **1. Faktor Sosialisasi**

Kebakaran yang disebabkan oleh manusia baik sengaja maupun tidak sengaja. Kebakaran ini terjadi di lahan gambut sangat sulit untuk dilakukan pemadaman terlebih di musim kemarau dengan kedalaman gambut diatas 1 (satu) meter lebih. Untuk kita ketahui gambut sebagai tanah hutan, terbentuk di daerah yg memiliki sistem drainase tanah yang buruk, dimana terdapat curah hujan sangat tinggi sehingga terjadi genangan di lantai hutan kemudian bahan-bahan (serasah) tersebut terakumulasi membentuk gambut.

Kebakaran ini mengakibatkan sumber daya hutan semakin hilang, ekosistem terganggu, serta kerugian ekonomi yang dirasakan masyarakat langsung jika kebun warga setempat ikut terbakar. Itu bisa mencegah agar tidak terjadi kebakaran hutan saat musim kemarau angin kencang dan suhu panas dapat

---

<sup>66</sup> Hasil olahan wawancara bapak hendra pada tanggal 12 juni 2017

memicu api kecil menjadi penyebab kebakaran hutan. Kondisi yang panas dan dedaunan yang kering bila terdapat percikan api sedikit saja dapat menyulut kebakaran yang besar dan tindakan-tindakan yang dapat menyebabkan terjadi kebakaran hutan. Kurangnya sosialisasi bagi masyarakat menjadi tugas wajib bagi pemerintah untuk lebih gencar dalam melakukan pembinaan dan penyuluhan pencegahan kebakaran hutan. Dan juga Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan perlu berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan dasar dan Kebudayaan dalam upaya mengubah perilaku manusia sejak dini untuk memahami bahaya kebakaran hutan dan lahan yaitu melalui anak sekolah. Jika perlu, pendidikan kebakaran hutan dan lahan serta lingkungan menjadi muatan dalam kurikulum pendidikan dasar. Langkah yang akan diambil dalam mencegah kebakaran hutan dan lahan di Indonesia meliputi:

- a. Mendidik masyarakat umum tentang langkah-langkah untuk pencegahan dan penindasan kebakaran, melalui kegiatan informasi terkoordinasi, untuk misalnya menggunakan media cetak, elektronik dan media lainnya.
- b. Melarang penggunaan pembakaran, dan mendidik masyarakat dengan cara-cara mempersiapkan lahan tanpa menggunakan api (*zero burning*).
- c. Meningkatkan keterampilan dan kemampuan tenaga kerja, termasuk karyawan sektor baik negara maupun swasta.
- d. Menyediakan peralatan pemadam kebakaran sesuai dengan yang ditentukan standar.
- e. Melakukan kerjasama teknis dengan negara-negara donor.
- f. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang tinggal di sekitar hutan.



- g. Memberikan hukuman ketat pada setiap pelaku yang melanggar arus undang undang Undang.
- h. Meningkatkan upaya untuk menegakkan hukum.

## 2. Faktor Kebiasaan

Potret kejadian kebakaran lahan gambut di masa lalu dan sekarang menunjukkan bahwa sebagian besar pemicu kebakaran berada di luar kawasan hutan yaitu pengguna pembersihan lahan tidur, api perladangan atau pertanian tradisional, pengguna api dalam pemanfaatan sumberdaya alam, dan pembukaan lahan oleh perusahaan yang melanggar aturan sehingga profil-profil manusia dalam aktivitas inilah yang dapat dijadikan obyek pembinaan pencegahan kebakaran dengan cara memberdayakannya menjadi regu pengendali kebakaran di tingkat desa dan kampung. Salah satu insentif yang menyebabkan masyarakat terus menggunakan api dalam pembukaan lahan adalah kepraktisan dan keuntungan efisiensi biaya dimana hanya memerlukan 20% daripada biaya pembukaan lahan tanpa bakar sehingga diperlukan teknologi alternatif yang lebih efisien dan praktis daripada pembukaan lahan menggunakan api. Kegiatan pencegahan kebakaran seharusnya menjadi kegiatan prioritas karena pada dasarnya kebakaran yang terlanjur besar dan luas merupakan bencana antropogenik yang sulit dipadamkan.

Kebiasaan masyarakat sejak dari dulu yang masih terjadi sampai saat ini yang berdampak buruk pada hutan ialah melakukan pembakaran untuk persiapan lahan atau membuka lahan baru. Pembakaran hutan untuk persiapan lahan nantinya dipergunakan sebagai lahan pertanian, perkebunan maupun pemukiman.

Pada era modern sekarang faktor pembangunan industri yang notabeneanya berlokasi di hutan juga membutuhkan lahan yang dapat dikatakan tidak sedikit dan terkadang bias mencapai beribu-ribu hektar.

Keberhasilan dalam mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan yang luas merupakan keberhasilan mengatasi dampak negatif kebakaran terhadap lingkungan ekologi seperti terhadap emisi gas rumah kaca, tanah dan air, lingkungan hayati, sosial ekonomi dan budaya masyarakat.. Upaya pemberdayaan masyarakat melalui pengendalian kebakaran berbasis masyarakat (PKBM) di sekitar hutan dan lahan merupakan pola alternatif pengelolaan kebakaran yang menjanjikan karena kejadian kebakaran selama ini banyak dipicu oleh kebiasaan pembakaran lahan masyarakat berskala kecil tetapi banyak, yang dilakukan setiap tahun di desa-desa dan ladang sekitar hutan.

### 3. Faktor Pendukung

Sebagian besar masyarakat yang berprofesi sebagai petani/penggarap, lebih memilih bentuk pengolahan lahan dengan cara mencangkul dan memupuk. Hal ini dilakukan karena masyarakat menilai bahwa bentuk pengolahan lahan tersebut lebih aman dan tidak merugikan orang lain. Namun pada kenyataannya, masih terdapat sekelompok masyarakat yang melakukan pembakaran di lahan garapannya (kebunnya).

Hal ini dilakukan karena sekelompok masyarakat tersebut menilai bahwa bentuk pengolahan/pembersihan lahan dengan cara membakar membutuhkan waktu yang relatif lebih cepat dan mengeluarkan biaya yang lebih murah dibandingkan dengan memupuk. Sehingga penyebab utama masyarakat

melakukan pembakaran lahan adalah karena masalah biaya, baik dalam modal maupun biaya untuk membeli pupuk. Selain para penggarap lahan yang mengolah/membersihkan lahan dengan cara membakar, masih terdapat pelaku pembakaran lain yang menyebabkan terjadinya kebakaran hutan. Masyarakat mengatakan bahwa selain para penggarap lahan yang melakukan bentuk pengolahan/pembersihan lahan dengan cara membakar, masih terdapat pelaku pembakaran lain yang menyebabkan terjadinya kebakaran hutan. Para pelaku kebakaran tersebut digolongkan menjadi oknum-oknum tertentu yang berasal dari pihak luar, seperti pengusaha.

Berdasarkan pengamatan di lapangan mengenai pelaku pembakaran, bahwa pelaku pembakaran kawasan hutan di Desa Bokor adalah masyarakat sekitar (penggarap lahan) itu sendiri. Hal ini ditunjukkan pada saat melakukan kegiatan pemadaman kebakaran, dimana masyarakat yang dipercayai oleh Petugas sebagai orang yang mengenal medan dan mengetahui keberadaan titik apisecara pasti, pada kenyataannya seringkali membuat kegiatan pemadaman kebakaran tersebut menjadi terhambat (masyarakat tersebut mengarahkan pasukan pemadam kebakaran ke arah yang berbeda, sehingga kegiatan pemadaman baru dapat dilakukan pada saat api telah menjalar dan menjadi kebakaran yang besar).Berdasarkan hasil pengamatan, observasi lapang dan wawancara dengan Masyarakat Sekitar, Petugas dan Satgasdamkar, berbagai penyebab buatan kebakaran hutan yang disebabkan oleh faktor manusia dapat terbagi lagi menjadi 2 sub faktor, yaitu sub faktor langsung dan sub faktor tidak langsung.

Sub faktor langsung pengolahan/pembersihan lahan dengan cara membakar masih terdapatnya sekelompok masyarakat yang mengolah/membersihkan lahan dengan cara membakar. Hal ini dilakukan karena adanya masalah biaya yang dialami oleh masyarakat tersebut, yaitu biaya untuk melakukan pembakaran lebih murah dibandingkan dengan biaya untuk membeli pupuk. Sub faktor tidak langsung adanya kecemburuan sosial berdasarkan pengamatan dan informasi yang dikumpulkan, dahulu perlakuan yang tidak adil terhadap kelompok-kelompok pemadam kebakaran, secara tidak langsung menimbulkan kecemburuan sosial pada kelompok masyarakat tertentu. Hal ini ditandai dengan kurangnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemadaman kebakaran hutan.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari penjelasan dan uraian di atas, penulis dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Melakukan dan memfasilitasi atau mengambil keuntungan dari kegiatan yang dapat menimbulkan dampak buruk perbuatan tersebut merusak lingkungan dengan cara membakar hutan didalam islam adalah sesuatu yang dilarang dan hukumnya haram sebagaimana yang dimaksud dalam fatwa MUI Nomor 30 Tahun 2016. Perbuatan tersebut termasuk dalam kategori tindak pidana (*jarimah*) yang dikenai sanksi hukuman bagi pelakunya yaitu *jarimah tak'zir* karena perbuatan membakar hutan meskipun tidak secara eksplisit diatur didalam Al-Qur'an maupun Hadis akan tetapi perbuatan tersebut jelas dilarang oleh *syara'*. Mengenai bentuk hukuman sepenuhnya adalah kewenangan penguasa (*ulil amri*).
2. Penyebab kebakaran hutan yang sering terjadi ada 2 dua faktor yaitu faktor alam dan faktor manusia.
  - a. Faktor yang disebabkan oleh alam terdiri dari petir dan larva gunung berapi.
  - b. Faktor yang disebabkan oleh faktor manusia terbagi menjadi 2 sub faktor, yaitu :
    - a. Sub faktor langsung
      - 1) Pengolahan/pembersihan lahan dengan cara membakar.

- 2) Pembakaran oleh orang yang tidak bertanggung jawab.
- b. Sub faktor tidak langsung
  - 1) Adanya kecemburuan sosial.
  - 2) Keberadaan *Enclave*.
3. Faktor tidak diterapkan fatwa MUI Nomor 30 Tahun 2016 di Desa Bokor yaitu kebiasaan masyarakat sejak dari dulu yang masih terjadi sampai saat ini yang berdampak buruk pada hutan ialah melakukan pembakaran untuk persiapan lahan atau membuka lahan baru kurangnya sosialisasi bagi masyarakat adalah faktor utama yang mengakibatkan melakukan pembakaran hutan demi kelangsungan hidup dan meminimalisir pengeluaran.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis laksanakan, ada beberapa catatan sebagai saran yang dapat diajukan yakni:

1. Diharapkan kepada masyarakat setempat agar menghentikan pembukaan Lahan dengan cara pembakaran. Karena jika tidak hutan dan lahan yang ada akan kehilangan fungsi dan manfaat untuk kemaslahatan bersama.
2. Diharapkan kepada pemerintah, pemerintah daerah, pemerintah setempat, tokoh-tokoh masyarakat, alim ulama supaya meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga dan meningkatkan fungsi dan manfaat hutan yang ada tanpa harus merusaknya. Dan kepada aparat

penegak hukum supaya melakukan pengawasan ketat terhadap perusakan lingkungan. Dan mampu membuat solusi yang tepat untuk masyarakat agar beralih membuka lahan dengan cara pembakaran dengan yang lebih efisien lagi.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Akib, Muhammad, *Hukum Lingkungan Prespektif Global Dan Nasional*  
Jakarta : PT RajaGrafindo Persada. 2014
- Ali Abdullah, *Agama Dan Ilmu Perbandingan*, Bandung : Nuansa Aulia,  
2007
- Al-Munawar, Said Agil, *Hukum Islam Dan Pluralitas Sosial*, (Jakarta:  
Penamadani, 2004), Hal.23.
- Al-Qardhawi, Yusuf, *Ri'ayatu Al-Bi`ah fi As-Syari'ah Al-Islamiyah*, Kairo:  
Dar Al-Syuruq, 2001
- Al-Zuhaili, Wahbah, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, Beirut : Dar Al-Fikr  
Al-Mu'ashir, 1998
- Amiruddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta:  
RajaGrafindo Persada, 2004
- Daud, Silalahi, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum  
Lingkungan Di Indonesia* Bandung : PT Alumni, 2001
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahan* Jakarta : Lajnah  
Pentashihan Mushaf, 2005
- Djamin, Djanius, *Pengawasan Dan Pelaksanaan Undang-Undang  
Lingkungan Hidup Suatu Analisis Sosial*, Jakarta : Yayasan Obor  
Indonesia, 2007
- Djazuli, A, *Kaidah-Kaidah Fikih*, Jakarta: Prenada Media Group, 2007
- Dodi, Nandika, *Hutan Bagi Ketahanan Nasional*, Surakarta: Muhammadiyah  
University Press, 2005
- Fuad, Amsyari, *Prinsip-Prinsip Masalah Pencemaran Lingkungan*, Jakarta :  
Ghalia Indonesia, 1977
- Hasbullah, *Dasar Dasar Ilmu Pendidikan*, Jakarta :Rajawali Pes, 2001
- Harun, M Husein, *Lingkungan Hidup : Masalah Pengelolaan Dan Penegakan  
Hukumnya*, Jakarta : Bumi Aksara, 1993
- Hayyan, Ibnu, *Al - Buhru Almuhiath*, Juz 5 Beirut : Dar Al-Fikr, Tt



- H Hilman, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Bandung : Mandar Maju, 1992
- Khakim, Abdul, *Pengantar Hukum Kehutanan Indonesia (Dalam Era Otonomi Daerah)*, Cet.1,Bandung : PT Citra Aditya Bakti,2005
- L Syaufina .*Kebakaran Hutan dan Lahan di Indonesia*. Malang: Bayumedia Publishing,2008
- Manaf, Mudjahid Abdul, *Sejarah Agama-Agama*, Jakarta : PT RajaGrafindo,1993
- Nandika, Dodi, *Hutan Bagi Ketahanan Nasional*, Surakarta : Muhammadiyah University Press,2005
- Noor, Mohammad, *Lahan Gambut Pengembangan, Konservasi Dan Perubahan Iklim*, Yogyakarta : Gadj Mada University Press,2010
- Notoatmodjo, Soekidjo, *Pendidikan Dan Perilaku Kesehatan*,Jakarta :PT Rineka Cipta, 2003
- Purbowaseso B, *Pengendalian Kebakaran Hutan Suatu Pengantar*, Jakarta: PT Rinetka Cipta,2004
- Rahmadi, Takdir, *Hukum Lingkungan Di Indonesia*, Jakarta : Rajagrafindo Persada, 2011
- Salindeho, Jhon, *Undang-Undang Gangguan Dan Masalah Penanggulangannya*, Jakarta : Sinar Grafika, 1993
- Salim, H.S, *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan*,Jakarta : Sinar Grafika , 2013
- Satria, Effendi, M.Zein, *Ushul Fiqih*, Jakarta: Kencana, 2005
- Santosa, Urip, *Hukum Agraria, Kajian Komprehensif*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013
- Subagyo P, Joko, *Hukum Lingkungan Masalah Dan Penanggulangannya*, Jakarta : Rineka, 1999.
- Supriyadi, Bambang Eko, *Hukum Agraria Kehutanan: Aspek Hukum Pertanahan Dalam Pengelolaan Hutan Negara*, Jakarta: Rajawali Pers,2013
- Suwardi, Widyaastuti, *Dasar-Dasar Perlindungan Hutan*, Yogyakarta. Gadj Mada University Press,2007

- Tim Penyusun, *Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Perspektif Hukum Dan Perundang-Undangan*, Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang Dan Diklat Kementerian Agama RI, 2012
- Triwibowo, Cecep, *Etika Dan Hukum Kesehatan* Yogyakarta: Nuha Medika, 2014
- Usman, Muchlis, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah Dan Fiqhiyah*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1999
- Wijoyo, Suparto, *Hukum Lingkungan : Mengenal Instrumen Hukum Pengendalian Pencemaran Udara Di Indonesia*, Surabaya : Airlangga University Press, 2004

## **B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

- Fatwa MUI Nomor 30 Tahun 2016 Tentang Hukum Pembakaran Hutan Dan Lahan Serta Pengendaliannya
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 45 Tahun 2004 Perlindungan Hutan. Jakarta: Sekretariat Jendral Departemen Kehutanan

## **C. WEBSITE**

- <https://news.detik.com/berita/d-3296899/fatwa-mui-bakar-hutan-danmerusak-lingkungan-adalah-haram>
- <https://mui.or.id/berita/mui-kalbar-haram-hukumnya-bakar-lahanapapunalasannya/>
- [http://www.inovasiaonline.com/web\\_ftnki/pg\\_articles.asp?sub=soc&ID=138](http://www.inovasiaonline.com/web_ftnki/pg_articles.asp?sub=soc&ID=138)
- [http://www.Kompasiana.Com/Alldie/Negara-Membenarkan-Pembukaan-LahanDengan-Cara-Dibakar\\_562b407b917a615a073fe578](http://www.Kompasiana.Com/Alldie/Negara-Membenarkan-Pembukaan-LahanDengan-Cara-Dibakar_562b407b917a615a073fe578)
- <http://Sains.Kompas.Com/Besarkah.Potensi.Kebakaran.Hutan.Dan.Lahan.Di-Indonesia/110500823/2017>
- [http://www.Walhi.Or.Id/Content/Uploads/2016/Outlook2016\\_Edit\\_1.Pdf](http://www.Walhi.Or.Id/Content/Uploads/2016/Outlook2016_Edit_1.Pdf)
- <http://www.najitama.blog.com>
- [http://jakarta.indymedia.org/newswire.php?story\\_id=](http://jakarta.indymedia.org/newswire.php?story_id=)
- <http://kalsel.muhammadiyah.or.id/>
- <http://dariislam.blog.com/2010/03fatwa-pengertian.html>

## **RIWAYAT HIDUP**

Nama lengkap penulis adalah Rien Herdianty Gunwan. Penulis dilahirkan di Tanjung Pura pada tanggal 04 Agustus 1995, putri dari pasangan suami istri Bapak DRs H. Gunawan dan Dra Hj. Dian Herawati.

Penulis menyelesaikan pendidikan tingkat SD di SDN 050727 T.pura pada tahun 2007, selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan di MTsN 1 T.Pura pada tahun 2010, dan melanjutkan pendidikan di SMAN 1 Stabat pada Tahun 2013, kemudian penulis melanjutkan kuliah di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Negeri Sumatera Utara Jurusan Muamalah pada tahun 2013. Pada masa pendidikan penulis aktif mengikuti perkuliahan kampus.

## DAFTAR WAWANCARA

1. Sudah berapa lama melakukan pembakaran hutan?
2. Mengapa anda melakukan pembakaran hutan, Apakah karena pekerjaan atau semata-mata hanya ingin membuka lahan saja?
3. Bagaimana cara yang digunakan untuk pembakaran hutan?
4. Apakah mengetahui hukum pembakaran hutan?
5. Apa yang anda rasakan saat melakukan pembakaran hutan tersebut?
6. Bagaimana pendapat anda mengenai pembakaran hutan ini, Apakah menguntungkan atau merugikan?